



RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
JL. SUTAN SYAHRIR NO.17, PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSSI Pangkalan Bun Tahun 2019. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja RSSI Pangkalan Bun dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, 20 Januari 2020

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

NIP.19711121 200212 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik yaitu dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan untuk mengetahui kendala permasalahan pencapaian target kinerja. Adapun hasil capaian kinerja RSSI Pangkalan Bun tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%	92,99%	92,99%	Sangat Berhasil
		BOR	60-85%	76,00%	76,00%	Berhasil
		LOS	6-9 hari	3,49 hari	3,49 hari	Berhasil
		TOI	1-3 hari	1,10 hari	1,10 hari	Berhasil
		BTO	40-50 kali	79,55 kali	79,55 kali	Berhasil
		NDR	25/1000	21,10/1000	21,10/1000	Berhasil
		GDR	45/1000	37,33/1000	37,33/1000	Berhasil
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%	51,20%	51,20 %	Kurang Berhasil
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan	80%	78,14 %	78,14 %	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Minimal (SPM) yang mencapai target				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%	76,74%	76,74%	Berhasil

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2019 Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah menetapkan program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Alokasi anggaran untuk 8 (delapan) program tersebut adalah sebesar Rp. 127.516.134.000 dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 120.757.298.943 (94,70).

Dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan maka perlu peningkatan komitmen dan tanggung jawab semua pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Rumah Sakit Sultan Imanudin tahun berikutnya serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan Rumah Sakit Sultan Imanudin.

DAFTAR ISI

Halaman Cover

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Data Umum Perangkat Daerah 3

 C. Aspek Strategis Perangkat Daerah 12

 D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah 13

 E. Sistematika Penyajian 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 15

 A. Rencana Strategis Perangkat Daerah..... 15

 B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 19

 C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)..... 20

 D. Perjanjian Kinerja 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

 A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 27

 B. Realisasi Anggaran 50

BAB IV PENUTUP 63

 A. Kesimpulan 63

 B. Solusi Atas Permasalahan 63

Lampiran..... 64

 1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Indikator
 Kinerja Utama 65

 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)..... 71

 3. Perjanjian Kinerja (PK)..... 72

 4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung..... 105

 5. Laporan Realisasi Anggaran 116

 6. Apresiasi yang Pernah Diterima 125

 7. SOP penyusunan LKjIP..... 126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan Pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.....	8
Tabel 2. Sarana Prasarana RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	9
Tabel 3. Keselarasan Visi Rumah Sakit dengan Visi Pemerintah Daerah	15
Tabel 4. Keselarasan Misi Rumah Sakit dengan Misi Pemerintah Daerah	15
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	17
Tabel 6. IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	19
Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019.....	21
Tabel 8. Kategorisasi Pencapaian Kinerja	27
Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	56
Tabel 10. Capaian Sasaran I.....	28
Tabel 11. Capaian Sasaran II.....	31
Tabel 12. Capaian Cost Recovery Rate RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	32
Tabel 13. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	35
Tabel 14. Rekapitulasi Survei IKM	36
Tabel 15. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	42
Tabel 16. Target dan realisasi penerimaan/pendapatan	50
Tabel 17. Realisasi Belanja	50
Tabel 18. Anggaran Belanja.....	50
Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keselarasan Visi Misi 16

Gambar 2. Pohon Kinerja 17

Gambar 3. Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat (*public services*) khususnya pelayanan kesehatan rujukan yang komprehensif, terpadu dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu, terjangkau secara adil dan merata baik pelayanan yang bersifat dasar spesialisistik maupun subspecialistik. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan secara paripurna merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada masa depan tantangan utama yang akan mempengaruhi dunia rumah sakit di Indonesia adalah globalisasi. Rumah Sakit milik pemerintah khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam melaksanakan fungsinya sebagai rumah sakit pemerintah menghadapi berbagai tantangan :

1. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan investasi jangka panjang;
2. RSUD mempunyai kewajiban untuk melayani penduduk miskin (*public goods*) yang setelah terjadi krisis jumlahnya semakin banyak;
3. RSUD diharapkan lebih responsif dan proaktif terhadap tuntutan segmen masyarakat yang mampu (*private goods*) dengan pelayanan bermutu;
4. RSUD semakin bersaing dengan rumah sakit lain dalam menangkap potensi pasar dan memperebutkan sumber daya manusia;
5. RSUD berhadapan dengan perkembangan teknologi kedokteran dan teknologi manajemen modern;
6. RSUD harus menghadapi inflasi ekonomi dan inflasi input kesehatan;
7. RSUD merupakan salah satu organisasi padat karya, profesi, fungsi, teknologi dan modal.

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai lembaga usaha nirlaba (*non-profit*) yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pusat rujukan pelayanan kesehatan yang tetap memperhatikan standar mutu pelayanan profesional, diharapkan tetap dipercaya oleh masyarakat serta mampu menarik pelanggan.

Namun demikian sebenarnya masih banyak kendala yang dihadapi rumah sakit dalam mengelola administrasi dan manajemennya, antara lain penetapan tarif yang perhitungannya masih di bawah *unit cost*, pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada teknik *accrual basis* yang mana belum diikuti dengan cara yang sama oleh pemerintah daerah. Pemerintah belum memiliki “*wing business*” **Smart Hospital** adalah sebuah impian kedepan sehingga dalam upaya untuk mewujudkannya, manajemen perlu terus melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sehingga mampu menghadapi tantangan zaman modern yang serba digital. Begitu pula sarana dan prasarana pelayanan yang belum lengkap dan semakin tua, serta ketinggalan zaman. Disisi lain teknologi kedokteran dan teknologi informasi dalam perkembangan yang bersifat global sangat pesat perkembangannya.

Tuntutan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin merupakan kebutuhan mendesak yang perlu disikapi dengan kemampuan petugas pelayanan serta dukungan peralatan yang memadai, merupakan unsur prioritas dalam meningkatkan performa kinerja rumah sakit. Posisi wilayah kota Pangkalan Bun sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah wilayah barat, merupakan posisi strategis sekaligus memerlukan tantangan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit yang memadai.

Efisiensi merupakan alasan aktual lainnya yang merupakan aspek yang harus dioptimalkan dengan mengedepankan pelayanan yang memuaskan, karena di sisi lain akan mendatangkan income bagi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, khususnya untuk pelayanan yang bersifat perorangan (*private good*) dengan tetap berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanan untuk fungsi sosial Rumah Sakit terutama bagi pasien kurang mampu. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin memerlukan pengelolaan yang strategik dan bermutu, optimalisasi sumber daya kesehatan yang ada, menggalang kemitraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor.

Selanjutnya dengan mengacu pada perencanaan strategis Rumah Sakit dan rencana kinerja Rumah Sakit tahun 2018 – 2022 (Renstra), maka perlu disusun program dan kegiatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2019 sebagai tahapan menuju terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Data Umum Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan unit organik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di kota Pangkalan Bun. Organisasi RSUD Sultan Imanuddin sebagai Rumah Sakit Kelas B berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/01/PK/XII/BPMDP/2015 Tanggal 30 Desember Tahun 2015, dan pada bulan Oktober 2017 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mendapatkan izin operasional kelas B.

Kedudukan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ditunjuk sebagai Pusat Rujukan Regional II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/339/2009.

Pada tanggal 17 Desember 2012 melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor RS/U.12.12.1910.I.1 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan harapan mutu pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2017 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun meraih predikat “**Lulus Akreditasi Paripurna**”.

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
3. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik;
4. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
5. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
6. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
7. Penyelenggaraan pembinaan SDM;
8. Pengelolaan satuan pengawas intern;
9. Pengelolaan komite medik, komite keperawatan, kelompok staf medik dan komite lain sesuai kebutuhan dan perkembangan rumah sakit;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun adalah unsur pelaksana Lembaga Tekhnis Daerah sebagai pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional: Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). Secara rinci sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 2) Seksi Logistik dan Perbekalan
- d. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Rawat Inap
- e. Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Penunjang Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medik

Kelompok Jabatan Fungsional: Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).

Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin

- a. Pelayanan gawat darurat;
- b. Pelayanan rawat jalan;
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan bedah;
- e. Pelayanan persalinan (Kebidanan) dan perinatologi;
- f. Pelayanan intensif (ICU/ICCU);
- g. Pelayanan radiologi;
- h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
- i. Pelayanan rehabilitasi medik;
- j. Pelayanan farmasi;
- k. Pelayanan hemodialisis;
- l. Pelayanan gizi;
- m. Pelayanan transfusi darah;
- n. Pelayanan keluarga miskin, BPJS kesehatan;
- o. Pelayanan rekam medis;
- p. Pengelolaan limbah;
- q. Pelayanan administrasi manajemen;
- r. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
- s. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
- t. Pelayanan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit;
- u. Pelayanan laundry;
- v. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- w. CSSD.

Rawat Jalan dan Rawat Darurat :

1. Klinik Kebidanan dan Kandungan;
2. Klinik Kesehatan Anak;
3. Klinik Penyakit Dalam;
4. Klinik Bedah;
5. Klinik Mata;
6. Klinik Saraf;
7. Klinik THT;
8. Klinik Jiwa;
9. Klinik Kulit dan Kelamin;
10. Klinik Paru;
11. Rawat Darurat;
12. Klinik Umum;
13. Klinik Gigi dan Mulut;
14. Klinik Orthodontis;
15. Klinik MCU;
16. Klinik Psikologi;
17. Klinik Gizi;
18. Klinik Rehabilitasi Medis;
19. Klinik VCT;
20. Klinik KIA-KB, Klinik Imunisasi;
21. Medical Check Up;
22. Klinik Tumbuh Kembang Anak;
23. Unit Elektro Kardio Graph;
24. Pojok Laktasi.
25. Hemodialisa.
26. Pojok Dots.
27. Klinik Orthopedi

Rawat Inap :

1. Perawatan Kebidanan dan Kandungan;
2. Perawatan Anak;
3. Perawatan VIP;
4. Perawatan Bedah;
5. Perawatan Perinatologi;
6. Perawatan Penyakit Dalam;
7. Perawatan ICU/ICCU;
8. Bedah Sentral;

9. Anastesi dan Reanimasi.
10. Ruang Isolasi

Penunjang Medis Dan Non Medis :

1. Radiologi;
2. Laboratorium Klinik;
3. Farmasi;
4. Gizi;
5. Laundri;
6. Ambulan 118 dan transportasi jenazah;
7. Pemulasaran jenazah;
8. Sterilisasi (CSSD).
9. Hemodialisa.
10. Bank Darah.

Administrasi dan SIMRS :

1. Billing System;
2. Sisten Informasi dan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (SIM BLUD);
3. SIM Farmasi;
4. SIM Aset
5. Rekam Medis;
6. Keterangan Kesehatan (MCU);
7. Pendidikan dan Pelatihan;
8. Pemasaran Sosial;
9. PKRS;
10. Perpustakaan;
11. Keuangan;
12. Perencanaan;
13. UKP

Pengelolaan Limbah :

1. Limbah Padat Rumah Sakit;
2. Limbah Cair Rumah Sakit;

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun didukung oleh tenaga medis sebanyak 43 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesiali dan dokter gigi spesialis serta 2 orang dokter yang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Tenaga perawat dan bidan 206, Sementara untuk tenaga administrasi telah mencukupi standar kebutuhan. Sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sesuai tabel tersebut dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan Pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

No.	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Keperawatan	170	33,73
2.	Non Nakes	207	41,07
3.	Kebidanan	36	7,14
4.	Keteknisan Elektromedik	3	0,60
5.	Dokter Spesialis	27	5,36
6.	Kefarmasian	18	3,57
7.	Nakes Lainnya	16	3,17
8.	Dokter Umum	13	2,58
9.	Gizi	5	0,99
10.	Keterapian Fisik	4	0,79
11.	Dokter Gigi	1	0,20
12.	Dokter Gigi Spesialis	2	0,40
13.	Kesehatan Lingkungan	1	0,20
14.	Kesehatan Masyarakat	1	0,20
Total		504	100

Sumber data: RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019

Sarana dan Prasarana

Tabel 2. Sarana Prasarana RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)
1	Gedung Kantor dan Administrasi	1 Unit
2	Instalasi Gawat Darurat	1 Unit
3	Rawat Jalan	2 Unit
4	Rawat Inap	9 Unit
5	Kamar Operasi	4 Unit
6	Kamar Bersalin	4 Unit
7	Instalasi Farmasi / Apotik	1 Unit
8	Laboratorium	1 Unit
9	Radiologi	1 Unit
10	Fisioterapy	1 Unit
11	Instalasi Gizi	1 Unit
12	Kamar Jenazah	1 Unit
13	IPAL	1 Unit
14	Incenerator	2 Unit
15	Gedung Genset	1 Unit
16	Perumahan Dokter Ahli	26 Unit
17	Perumahan Direktur	1 Unit
18	Kendaraan Dinas Direktur (roda 4)	1 Unit
19	Kendaraan Dinas Dokter Ahli (roda 4)	17 Unit
20	Kendaraan Dinas Dokter Umum (roda 2)	1 Unit
21	Ambulance	3 Unit
22	Mobil Jenazah	2 Unit
23	Lemari Pasien	222 Unit
24	Kursi pertemuan	160 Unit
25	Kursi Tunggu Pasien	100 Unit
26	Laptop	24 Unit
27	Komputer	75 Unit
28	Printer	82 Unit
29	LCD Projector	5 Unit
30	Faximile	2 Unit
31	Kipas Angin	20 Unit
32	Kulkas	30 Unit
33	Televisi	38 Unit
34	AC	255 Unit
35	WhiteBord	16 Unit

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)
36	Genset	5 Unit
37	USG	2 Unit
38	UV sterilizer	1 Unit
39	Baby Incubator	13 Unit
40	Laser Theraphy	1 Unit
41	Blood Bank Refrigerator	1 Unit
42	Photometer Full Analyzer	1 Unit
43	Mesin Phacoemulsification	1 Unit
44	Operating Microscope	1 Unit
45	Basic Radiography System	1 Unit
46	X-ray Unit	1 Unit
47	CT- Scanner	1 Unit
48	Automatic Film Processing	1 Unit
49	Electro Countary Treatment	2 Unit
50	Incenerator	2 Unit
51	Server	2 Unit
52	CCTV	61 Unit
53	Alat Pemadam Kebakaran/Hydrant	18 Tabung

Kondisi Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun meliputi gedung/bangunan, rumah dinas, kendaraan operasional, peralatan kesehatan dan perlengkapan Rumah Sakit, yang secara rinci kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Gedung/bangunan RSUD Sultan Imanuddin terdiri dari :
 - 1) Gedung Administrasi;
 - 2) Instalasi Gawat Darurat;
 - 3) Gedung Poliklinik (Umum dan Spesialis);
 - 4) Gedung Radiologi;
 - 5) Gedung Fisioterapi;
 - 6) Gedung Laboratorium;
 - 7) Gedung ICU - ICCU;
 - 8) Gedung bedah sentral;
 - 9) Ruang Perawatan Penyakit Dalam Pria (Akasia);
 - 10) Ruang Perawatan Penyakit Dalam Wanita (Sindur);
 - 11) Ruang Perinatologi;

- 12) Ruang kebidanan dan kandungan (Bengkirai);
- 13) Ruang VIP (Ulin);
- 14) Ruang VIP (Ramin);
- 15) Ruang Perawatan Bedah (Meranti);
- 16) Ruang perawatan anak (Lanan);
- 17) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana (IPSRs);
- 18) Gedung Apotik dan Farmasi;
- 19) CSSD dan Laundry;
- 20) Instalasi Kamar Jenazah;
- 21) Instalasi Gizi/ Dapur;
- 22) Gedung Genset;
- 23) Incenerator;
- 24) IPAL

Gedung/bangunan RSUD Sultan Imanuddin masih perlu dikembangkan sesuai dengan **master plan RSUD Sultan Imanuddin**, sehingga ada beberapa gedung yang perlu dibangun yakni, gedung rawat inap, gedung rehabilitasi medik, gedung pemulasaraan jenazah, gudang sentral, gedung CSSD, gedung hemodialisa, gedung laundry, dan pemagaran dilingkungan RSUD Sultan Imanuddin.

- b. Rumah Dinas RSUD Sultan Imanuddin sebanyak **27 buah** terdiri dari :
 - 1) Rumah dinas jabatan (direktur) : 1 buah (rumah pemda);
 - 2) Rumah dinas dokter umum/drg/spesialis: 26 buah;

Kondisi rumah dinas RSUD Sultan Imanuddin dari 26 buah rumah dinas, 22 rumah dinas kondisinya baik, 4 rumah dinas rusak ringan, dan 1 rumah dinas rusak berat, sehingga perlu perbaikan/rehabilitasi.
- c. Kendaraan dinas/Operasional RSUD Sultan Imanuddin sebanyak 38 buah terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 26 buah dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 12 buah, secara rinci sebagai berikut:
 - 1). Kendaraan dinas roda empat jabatan direktur : 1 buah;
 - 2). Kendaraan dinas roda empat dokter spesialis : 15 buah;
 - 3) Kendaraan dinas roda empat operasional : 2 buah;
 - 4) Kendaraan dinas roda empat ambulance pasien : 5 buah, (2 buah ambulance pasien hibah dari PT. ASKES dan PT. BRI);
 - 5) Kendaraan dinas roda empat ambulan jenazah : 3 buah; (1 buah rusak berat dan 1 rusak ringan);

6) Kendaraan dinas roda dua operasional : 12 buah.

Kondisi kendaraan dinas RSUD Sultan Imanuddin baik roda empat maupun roda dua pada umumnya baik, namun perlu penambahan kendaraan yaitu ambulan (tipe 4WD) untuk mengatasi peningkatan jumlah pasien yang perlu diantar terutama untuk daerah-daerah terpencil dengan medan yang berat, serta kendaraan dinas roda empat untuk operasional dokter spesialis.

- d. Peralatan kesehatan/kedokteran yang dimiliki RSUD Sultan Imanuddin terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, peningkatan ini sejalan dengan arah peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi kelas B Pendidikan.
- e. Perlengkapan yang dimiliki RSUD Sultan Imanuddin seperti meubeler, komputer, printer, peralatan audiovisual untuk kegiatan penyuluhan/promosi, telepon/aipon, AC, perlengkapan rumah tangga (dapur, laundry) dan lain-lain pada umumnya dalam kondisi baik, namun dengan bertambahnya pengunjung/pelanggan RSUD Sultan Imanuddin, dan penyesuaian dengan standar akreditasi rumah sakit, maka masih diperlukan pengadaan perlengkapan rumah sakit untuk menunjang kelancaran pelayanan.

C. Aspek Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan Renstra karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa tiga tahun mendatang.

D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan kesehatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan.

Permasalahan internal adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya dokter spesialis seperti dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah syaraf, guna mendukung peningkatan layanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional.
2. Dengan bertambahnya gedung-gedung baru di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, akan membutuhkan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sampai saat ini kebutuhan SDM masih belum mencukupi khususnya bagi tenaga kesehatan di unit pelayanan rawat inap.
3. Masih tingginya biaya operasional rumah sakit dibanding pendapatan RS

Permasalahan eksternal adalah sebagai berikut:

Memasuki tahun anggaran 2019 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya:

1. Pembayaran klaim BPJS masih belum tepat waktu atau sering mengalami keterlambatan pembayaran ke pihak RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
2. Sudah adanya pesaing di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap persaingan jasa pelayanan kesehatan, sudah mulai ada klinik-klinik swasta dan RS Swasta. Semakin banyaknya dokter membuka praktek dan mendirikan klinik, menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi semakin ketat. Semakin banyak pilihan yang ditawarkan pada pasar (pasien-pasien) semakin mudah mereka memilih.

Urutan prioritas isu strategis yang perlu diangkat dan selanjutnya perlu adanya pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan standar.

2. Belum terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar kelas rumah sakit.
3. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan yang baik, akuntabel, efektif, efisien, dan produktif.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja RSSI Pangkalan Bun tahun 2019 merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2019. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, RSSI Pangkalan Bun akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (performance gap) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKjIP RSSI Pangkalan Bun tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Data Umum Perangkat Daerah
- C. Aspek Strategis Perangkat Daerah
- D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Perangkat Daerah
- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- D. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Solusi Atas Permasalahan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3. Keselarasan Visi Rumah Sakit dengan Visi Pemerintah Daerah

Visi Rumah Sakit	Keterkaitan Dengan Visi Pemerintah Daerah
Rumah Sakit Mandiri Dengan Pelayanan Prima.	Visi Pemerintah Daerah “Gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”. Selaras dengan Visi Pemerintah Daerah maka Visi Rumah Sakit Sultan Imanuddin mendukung terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dengan pelayanan prima khususnya pelayanan rujukan.

Tabel 4. Keselarasan Misi Rumah Sakit dengan Misi Pemerintah Daerah

No.	Misi Rumah Sakit	Keterkaitan Dengan Misi Pemda
1	Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional dengan prinsip sosial ekonomi secara efektif dan efisien serta mampu berdaya saing.	Rumah Sakit Sultan Imanuddin melaksanakan penjabaran dari misi 2 (dua) yaitu: “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan , dan Olahraga”.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang profesional, produktif dan berkomitmen sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan.	
3	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, nyaman dan terjangkau dengan dilandasi etika profesi.	
4	Mewujudkan pelayanan yang pro-aktif dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.	



Gambar 1. Keselarasan Visi Misi

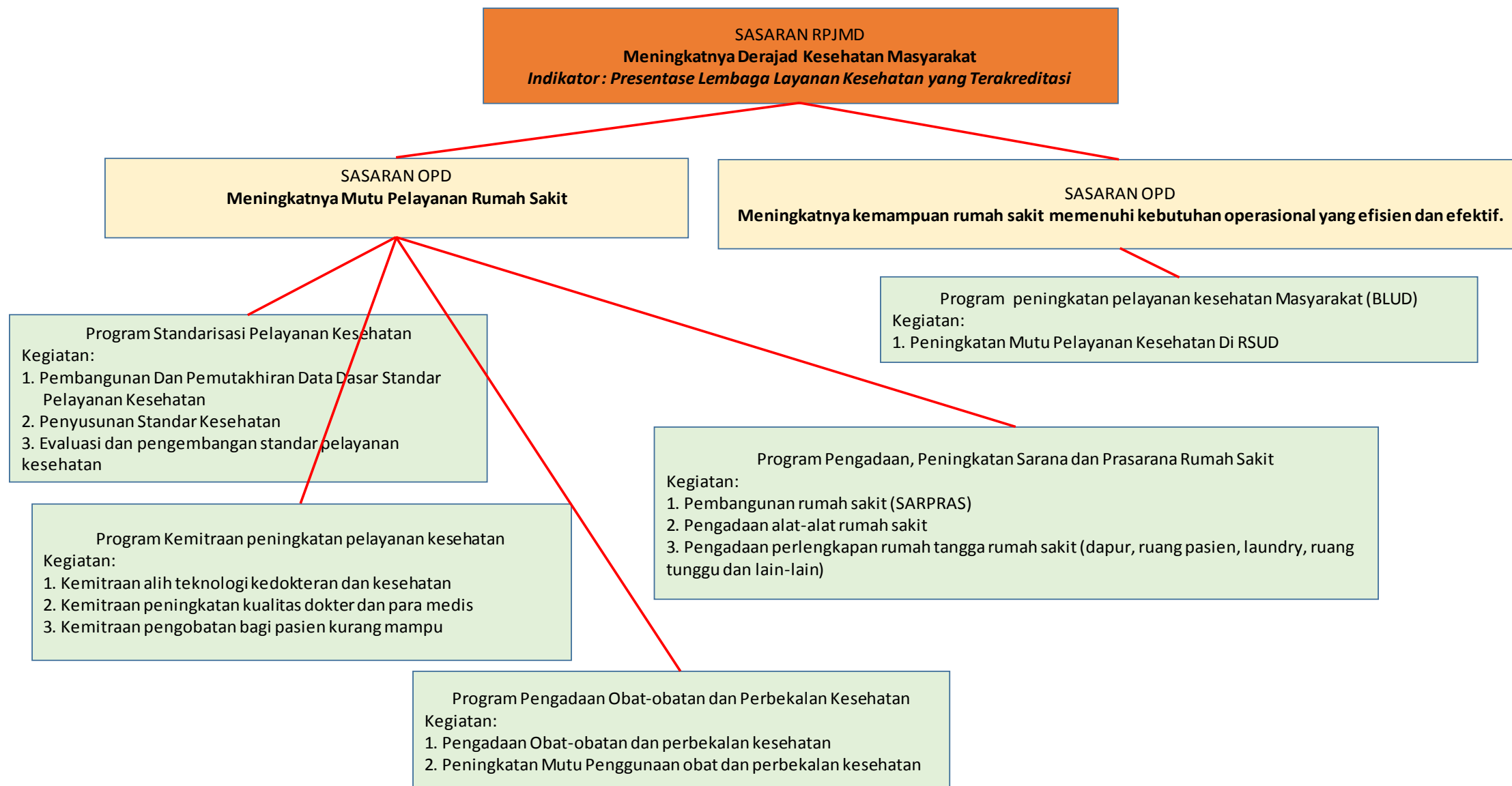
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan. Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam bentuk tabel 10 berikut:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga	Indek Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	Terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu	Presentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi



Gambar 2. Pohon Kinerja



Gambar 3. Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 6. IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Satuan Target
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100.	> 80 % (Pari purna)
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	%
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	hari
	TOI	Turn Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	hari
	BTO	Bed Turn Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	kali
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	25/1000

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Satuan Target
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	45/1000
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery = Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran	60%
	Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus.	80%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	76,61%

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja disusun dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target. Penetapan sasaran Rencana Kinerja dituangkan sesuai dengan sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra.

Sasaran tersebut kemudian diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja. Pada setiap akhir

tahun, Penetapan Kinerja ini akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berikut rumusan rencana kinerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun TA. 2019

Penjabaran dari rencana kinerja tahunan disertai dengan program/kegiatan dan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Komponen Penetapan Kinerja terdiri dari Sasaran, Indikator Kinerja, Target, program/kegiatan dan anggaran tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
A.	Sasaran 1: Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Kegiatan: Penyusunan Standar Kesehatan 2. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Rp. 150.000.000
		BOR LOS TOI BTO NDR GDR	60-85% 6-9 hari 1-3 hari 40-50 kali 25/1000 45/1000	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan: 1. Pembangunan Rumah Sakit 2. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	Rp. 50.217.875.800

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan: 1. Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 2. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 3. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Rp. 1.155.701.400
B.	Sasaran 2: Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan berikut: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Rp. 106.734.340.200,00
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%		

Rencana Target Kinerja Dan Dasar Penentuan Target Kinerja OPD

PENYESUAIAN RENSTRA							
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Penjelasan terhadap skala capaian	SATUAN TARGET	RENCANA TARGET		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100. Idealnya untuk capaian adalah paripurna (>80%)	<p>Dasar: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. Pada pasal 10 berbunyi "Penetapan status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi berdasarkan rekomendasi Akreditasi dari survei"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus akreditasi Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari 60 % 2. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 % 3. Akreditasi tingkat madya Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 7 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 % 4. Akreditasi tingkat utama Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 % . 5. Akreditasi tingkat paripurna Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15 bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 % 	> 80 % (Pari purna)	80 %	90 %	90 %
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan ketersediaan ruangan dan tempat tidur yang ada di RSUD 2. Kelebihan beban kerja dari para SDM di RSUD 	%	60-85%	60-85%	60-85%

PENYESUAIAN RENSTRA							
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Penjelasan terhadap skala capaian	SATUAN TARGET	RENCANA TARGET		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	<ol style="list-style-type: none"> Semakin panjang LOS maka menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuhnya). Dari aspek ekonomis, semakin panjang LOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien 	hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
	TOI	Turn Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	Semakin kecil angka TOI berarti semakin singkat saat TT menunggu pasien berikutnya. Hal ini berarti TT sangat produktif, apalagi TOI = 0 berarti TT tidak sempat kosong satu hari pun ini menguntungkan dari segi ekonomi. Tapi sangat merugikan bagi pasien karena TT tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya kejadian nosokomial mungkin bisa meningkat	hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari
	BTO	Bed Turn Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	<ol style="list-style-type: none"> Semakin tinggi BTO maka TT tersebut semakin sering digunakan bergantian. Mudah menimbulkan ketidakpuasan pasien Bisa menurunkan kinerja kualitas medis Bisa meningkatkan kejadian nosokomial karena tempat tidur tidak sempat dibersihkan atau disterilkan. 	kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar,	Angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar	Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000

PENYESUAIAN RENSTRA																																
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Penjelasan terhadap skala capaian	SATUAN TARGET	RENCANA TARGET																											
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022																									
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery= Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran. Nilai ideal CRR adalah > 60%.	Kemampuan mempertahankan hidup dan mengembangkan rumah sakit. 1. CRR harus di atas 60%. 2. Untuk mencapai cost recovery yang baik tentu saja tarifnya harus dihitung berdasarkan total biaya meliputi investasi dan biaya operasional (total cost) yang dikeluarkan.	%	>60%	>70%	>80%																									
	Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus. Nilai ideal untuk indikator pelayanan minimal adalah 80%.	Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Berisi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pada bagian lampiran Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terdapat SPM Rumah sakit. Target yang persyaratkan untuk SPM RSUD adalah di atas 80 %.	%	80%	80%	80%																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. Capaian kinerja unit pelayanan minimal adalah baik (>78,61 %).	Nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan <table border="1"><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval</th><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber : Permenpan – RB Nomor 14 Tahun 2017 Target yang direncanakan untuk kinerja unit pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin adalah di atas Nilai Interval Konversi lebih dari 76,61 % dengan kinerja yang diharapkan Baik sampai Sangat Baik	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik	%	>76,61 %	>76,61 %	>76,61 %
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																												
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																												
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																												
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik																												

D. Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel 8. Kategorisasi Pencapaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Berhasil
2	76 % ≤ 90 %	Berhasil
3	66 % ≤ 75 %	Cukup Berhasil
4	51 % ≤ 85 %	Kurang Berhasil
5	≤ 50 %	Tidak Berhasil

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

Sasaran 1	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit.
-----------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%	92,99%	92,99%	Sangat Berhasil
		BOR	60-85%	76,00%	76,00%	Berhasil
		LOS	6-9 hari	3,49 hari	3,49 hari	Berhasil
		TOI	1-3 hari	1,10 hari	1,10 hari	Berhasil
		BTO	40-50 kali	79,55 kali	79,55 kali	Berhasil
		NDR	25/1000	21,10/1000	21,10/1000	Berhasil
		GDR	45/1000	37,33/1000	37,33/1000	Berhasil

Sasaran Strategis : Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit

a. Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi.

Akreditasi rumah sakit merupakan proses kegiatan peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan terus menerus oleh rumah sakit. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan survei verifikasi akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah memenuhi syarat penilaian dan telah melaksanakan rekomendasi dari semua standar dan elemen penilaian

pada masing-masing Pokja. Dari 15 Pokja dengan jumlah elemen penilaian sebanyak 1535 elemen, RSUD Sultan Imanuddin mampu memenuhi dan melakukan upaya perencanaan perbaikan strategis (PPS) sebanyak 92,99% atau sebanyak 1247 elemen penilaian sudah memenuhi syarat penilaian dengan status akreditasi Paripurna.

- b. *Bed Occupancy Rate (BOR)***, yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur rumah sakit pada satu satuan waktu tertentu, dengan satuan %.

BOR sering disebut juga :

- *Percent of Occupancy*
- *Occupancy Percent*
- *Occupancy Ratio*

Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (>85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit/penambahan tempat tidur.

Tahun 2019 sebesar 76,00% hal ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur pasien masih ideal, dengan jumlah pasien rawat inap sebesar 15.719 orang.

- c. *Average Length of Stay (AvLOS)***, yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6-9 hari.

AvLOS adalah rata-rata lamanya seorang pasien dirawat. Indikator ini dirumuskan sebagai rasio jumlah hari perawatan rumah sakit terhadap jumlah pasien keluar (hidup dan mati), satuan hari. Indikator ini di samping memberikan gambaran *tingkat efisiensi* juga dapat memberikan gambaran *mutu pelayanan*. Interpretasi AvLOS tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersama sama dengan interpretasi BOR, BTO dan TOI.

LOS dianjurkan serendah mungkin tanpa mempengaruhi kualitas pelayanan perawatan. Dari aspek medis, semakin panjang LOS maka menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuh).

Dari aspek ekonomis, semakin panjang LOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien jadi diperlukan keseimbangan antara sudut pandang medis dan ekonomi untuk menentukan LOS yang ideal.

Tahun 2019 sebesar 3,49 hari, rata-rata lama perawatan pasien waktunya lebih singkat dikarenakan jumlah tempat tidur pasien terbatas dibandingkan dengan banyaknya jumlah pasien yang dirawat inap.

- d. **Turn Over Internal (TOI)**, yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1-3 hari. Indikator ini dirumuskan sebagai rasio selisih jumlah tempat tidur dikalikan hari dalam satuan waktu kemudian dikurangi hari perawatan rumahsakit terhadap jumlah pasien keluar (hidup dan mati). Memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur makin jelek. Semakin besar angka TOI, berarti semakin lama saat kosongnya TT. Hal ini berarti TT tidak produktif. Kondisi ini tidak menguntungkan dari segi ekonomi rumah sakit. Semakin kecil angka TOI berarti semakin singkat saat TT menunggu pasien berikutnya. Hal ini berarti TT sangat produktif, apalagi TOI = 0 berarti TT tidak sempat kosong satu hari pun ini menguntungkan dari segi ekonomi. Tapi sangat merugikan bagi pasien karena TT tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya kejadian nosokomial mungkin bisa meningkat. Capaian TOI di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019 sebesar 1,10 hari. Hal ini sudah ideal sesuai dengan yang target yang telah ditentukan.
- e. **Bed Turn Over (BTO)**, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit dalam satuan waktu tertentu yang diukur sebagai rasio jumlah pasien keluar (hidup dan mati) terhadap jumlah tempat tidur, satuan kali. Indikator ini memberikan gambaran *tingkat efisiensi* dari pemakaian tempat tidur. Interpretasi indikator BTO dilakukan bersama-sama dengan TOI dan LOS. Semakin tinggi BTO maka TT tersebut semakin sering digunakan bergantian. Kondisi ini mudah menimbulkan ketidakpuasan pasien, bisa menurunkan kinerja

kualitas medis, bisa meningkatkan kejadian nosokomial karena tempat tidur tidak sempat dibersihkan atau disterilkan.

Capaian BTO di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019 sebesar 79,55 kali, hal ini dikarenakan meningkatnya pasien yang rawat inap.

- f. Net Death Rate (NDR)**, yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. Tahun 2019 sebesar 21,10 permil, artinya angka kematian bersih di rumah sakit berkategori baik karena terletak kurang dari 25 per 1000.
- g. Gross Death Rate (GDR)**, yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Tahun 2019 sebesar 37,33 permil.

Sasaran 2	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.
-----------	---

Tabel 10. Capaian Sasaran II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%	51,20%	51,20 %	Kurang Berhasil
	Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%	78,14 %	78,14 %	Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%	76,74%	76,74%	Berhasil

a. Cost Recovery Rate (CRR)

Cost Recovery Rate (CRR) adalah indikator efisiensi dan merupakan tingkat kemampuan mengembalikan biaya dari suatu unit usaha dalam periode tertentu. Cost Recovery Rate (CRR) merupakan perbandingan antara total pendapatan dan faktor biaya berdampak terhadap CRR. Rumah sakit harus dapat mempertahankan hidup dan

mengembangkan rumah sakit dengan biaya mandiri secara bertahap yaitu:

- CRR harus di atas 60%.
- Harus sudah menyusun bisnis plan yang baik.
- Untuk mencapai cost recovery yang baik tentu saja tarifnya harus dihitung berdasarkan total biaya meliputi investasi dan biaya operasional (total cost) yang dikeluarkan.

Peningkatan *Cost Recovery Rate* (CRR), yaitu nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*). Secara singkat CRR adalah perbandingan antara seluruh pendapatan dengan seluruh biaya produksi. Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien askes.

Rumus CRR yaitu Total Realisasi Pendapatan dibagi Total Realisasi Belanja.

Untuk mencapai cost recovery yang baik dengan menghitung berdasarkan total biaya meliputi investasi dan biaya operasional (total cost) yang dikeluarkan.

Capaian pada tahun 2019 masih berada pada posisi di bawah target (69 %) ini menunjukkan bahwa CRR di RSUD Sultan Imanuddin masih kurang berhasil. Upaya yang harus dilakukan yaitu menyusun bisnis plan yang baik. Upaya inovasi pelayanan dan mempertahankan mutu guna menambah nilai pendapatan RS.

Tabel 11. Capaian Cost Recovery Rate RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

No	Tahun	Satuan	Target	Perhitungan (Total Realisasi Pendapatan)/(Total Realisasi Belanja)	Capaian
1.	2017	%	>=60%	62.570.315.255,65	43,34%
				144.361.630.848,23	
2.	2018	%	>=60%	80.353.251.760,98	55,74 %
				144.150.859.702,84	
3.	2019	%	>=60%	79.723.080.765,43	51,20 %
				155.723.776.448,12	

Pada Indikator CRR berhubungan dengan pendapatan. Beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan tahun 2019:

1. Pendapatan Farmasi, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya pengguna Jaminan Kesehatan Nasional khususnya BPJS sehingga pendapatan farmasi menjadi satu kesatuan paket klaim BPJS;
2. Klaim BPJS Kesehatan, secara angka per tahun menurun tapi jika dibandingkan per pelayanan meningkat, karena pendapatan Tahun 2018 yang berjumlah 55 M itu merupakan pendapatan klaim 12 bulan pelayanan (Oktober 2017 sd September 2018) sedangkan pendapatan Tahun 2019 yang berjumlah 55 M merupakan pendapatan klaim 11 bulan pelayanan (Oktober 2018 sd Agustus 2019);
3. Ruang Perawatan, beberapa pendapatan ruang perawatan menurun seiring meningkatnya pasien pengguna JKN khususnya BPJS Kesehatan;
4. Beberapa Poliklinik, antara lain Klinik Orthopedi dan Poli Psikologi, hal ini disebabkan antara lain Tahun 2018 masih ada Spesialis Orthopedi sedangkan akhir tahun 2018 yang bersangkutan telah pindah sedangkan pada poli psikologi disebabkan antara lain pasien pindah ke poli Jiwa karena telah adanya Psikiater (Spesialis Kejiwaan) ;
5. Pendapatan Lainnya, antara lain RSUD sudah tidak lagi mengelola Pendapatan Sewa Ruangan dan pendapatan lain seperti pembuatan Surat Keterangan dan sejenisnya karena sudah masuk paket pemeriksaan dan pelayanan lain.

Simpulan: jika pembayaran Klaim BPJS tidak terlambat atau sama dengan pembayaran bulan klaim tahun sebelumnya, maka Total Realisasi Pendapatan Tahun 2019 akan mengalami peningkatan sekitar 5 M dari tahun sebelumnya.

Upaya peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan tata kelola baik sumber daya manusia, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana serta penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Kotawaringin Barat dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program kesehatan, kondisi lingkungan strategis, kependudukan, pendidikan, kemiskinan, dan perkembangan baru lainnya.

b. Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain.

Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses hasil dan atau manfaat pelayanan. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang paripurna tentu menjadi harapan seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat tentu sangat tergantung pada bagaimana rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien/keluarga. Penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan tidak selalu sama untuk semua orang. Ada yang merasa sudah menerima pelayanan yang baik atau

sebaliknya ada beberapa anggota masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diterimanya di rumah sakit

Keluhan adalah salah satu indikator atau gejala dan tanda adanya ketidakpuasan layanan rumah sakit kepada pasien, apakah itu pelayanan dokter, perawat atau pelayanan administrasi. Ketidakpuasan terhadap pelayanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal, yaitu (1) Aspek dokter meliputi kompetensi, ketersediaan dan kualitas layanan, serta empati; (2) Aspek perawat meliputi kecepatan respons dan kerja sama perawat dalam membantu menyelesaikan masalah pasien; (3) Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium dan administrasi termasuk keuangan; (4) Aspek lain seperti sarana, peralatan dan kebersihan gedung. Sedangkan faktor eksternal rumah sakit yang terkait adalah faktor yang mempengaruhi aksesibilitas (penggunaan pelayanan) dan meliputi geografis: jarak pasien dengan tempat pelayanan, transportasi, tarif, dan jam buka. Lebih lanjut, dari aspek pasien sendiri adalah harapan pasien dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan akan pelayanan rumah sakit.

Harapan pasien akan pelayanan rumah sakit ditentukan pula oleh pengalaman dan tipe kepribadian pasien dalam menanggapi tindakan dokter dan perawat. Ketidakpuasan pelayanan ada yang langsung dinyatakan dengan emosi (marah atau lapor pimpinan) dan sebagian besar secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan tindakan tidak datang lagi, pindah rumah sakit dan bahkan menjelek-jelekkan pelayanan rumah sakit.

Tabel 12. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan – RB Nomor 14 Tahun 2017

Tabel 13. Rekapitulasi Survei IKM

No.	Unsur Pelayanan	Tahun 2018		Tahun 2019		
		Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	75,59	Kurang Baik	78,26	B	Kurang Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	73,95	Kurang Baik	76,43	C	Kurang Baik
U3	Waktu Pelayanan	68,09	Kurang Baik	67,32	C	Kurang Baik
U4	Biaya/tarif	83,22	Baik	80,43	B	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	74,63	Kurang Baik	75,75	C	Kurang Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	76,05	Kurang Baik	78,40	B	Kurang Baik
U7	Perilaku Pelaksana	77,63	Baik	78,46	B	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	67,24	Kurang Baik	70,18	C	Kurang Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	82,17	Baik	85,39	B	Baik
Nilai IKM		75,35	Kurang Baik	76,74	B	Baik

Ada 5 unsur pelayanan yang mendapatkan kategori B dengan kinerja unit pelayanan Baik yaitu 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif Pelayanan, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Perilaku Pelaksana dan 5) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Unsur pelayanan yang lainnya masuk dalam kategori C (Kurang Baik) yaitu 1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 4) Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu unsur-unsur pelayanan tersebut harus diperbaiki. Unsur pelayanan Perilaku Pelaksana sudah tergolong memuaskan namun masih perlu ditingkatkan.

Perilaku Pelaksana yang perlu ditingkatkan terkait kesopanan, keramahan dan komunikasi yang baik dari petugas/pelaksana pada

saat berhadapan atau menangani pasien/keluarga. Hal ini juga berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana, seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara Kompetensi Pelaksana dengan Perilaku Pelaksana. Yang mana semakin kompeten seorang pelaksana maka ia akan menunjukkan perilaku yang sopan dan ramah.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan tergolong sudah memuaskan namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini terkait kesiapan dalam menangani dan menyelesaikan laporan/masalah pasien/keluarga, dan kotak pengaduan yang dinilai kurang berfungsi dengan baik.

Unsur pelayanan Persyaratan Pelayanan dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur dinilai kurang memuaskan dan harus diperbaiki. Kedua unsur tersebut memiliki hubungan yang signifikan, apabila persyaratan sudah sesuai, maka akan mempermudah prosedur untuk mendapatkan pelayanan. Namun hal tersebut mengalami kendala yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Unsur pelayanan Sarana dan Prasarana dinilai kurang memuaskan sehingga perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Unsur Sarana dan Prasarana yang menjadi masalah terkait beberapa fasilitas (toilet, AC, lemari penyimpanan, kursi penunggu dan lain-lain) yang tidak ada atau rusak. Selain itu juga menyangkut kebersihan ruangan yang dinilai kotor dan berbau.

Unsur sarana dan prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan produk spesifikasi jenis pelayanan. Artinya semakin baik sarana dan prasarana maka output pelayanan akan lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Waktu Pelayanan mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan dari masyarakat dan mendapatkan penilaian paling rendah dibandingkan unsur yang lainnya. Hal ini terkait waktu tunggu/penyelesaian suatu pelayanan yang dinilai lama. Selain karena kehadiran pelaksana yang terlambat, juga disebabkan pemahaman masyarakat yang kurang tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama.

Unsur pelayanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dinilai kurang memuaskan dan harus diperbaiki/ditingkatkan. Hal ini disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa hasil pelayanan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada juga yang menganggap bahwa ketidak sesuaian hasil pelayanan dengan standar yang ditetapkan karena kurangnya tenaga serta sarana dan prasarana. Hal ini juga didukung dari hasil analisis yang menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kompetensi pelaksana dengan produk spesifikasi jenis pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, kesimpulannya sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM yang berkisar antara 65,00 – 76,60. Nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 76,74.
2. Hasil survei menunjukkan hanya ada 5 unsur pelayanan yang dipersepsikan Baik oleh masyarakat dengan nilai IKM yang berkisar antara 76,61 – 88,30. Unsur-unsur pelayanan tersebut meliputi 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif Pelayanan, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Perilaku Pelaksana dan 5) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Unsur pelayanan yang masuk dalam kategori yang dipersepsikan oleh masyarakat Kurang Baik dengan nilai IKM berkisar antara 65,00-76,60 yaitu 1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 4) Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu unsur-unsur pelayanan tersebut harus segera diperbaiki.
4. Nilai IKM pada unit-unit pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin yang dipersepsikan oleh masyarakat Sangat Baik dan Baik ada 7 unit pelayanan yaitu Instalasi Gawat Darurat, Perinatologi dan Persalinan, Instalasi Rehabilitasi Medik, Unit Hemodialisa kemudian diikuti oleh Ruang dan Ruang Perawatan Akasia dan Ruang Perawatan Lanan.
5. Unit pelayanan yang dipersepsikan masyarakat Kurang baik adalah Instalasi Laboratorium, Ruang Perawatan Sindur, Ruang Perawatan

VIP, ICU, Instalasi Radiologi, Perawatan Meranti, Instalasi Bedah memiliki dan Instalasi Rawat Jalan.

Rekomendasi atas hasil kesimpulan dan analisa data survei IKM Tahun 2019 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai berikut:

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama dalam kedisiplinan menjalankan SOP.
2. Diperlukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang terlibat secara langsung dalam pelayanan.
3. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan baik kepada masyarakat maupun pelaksana terkait aturan-aturan yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberi motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja

yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai sebesar 71,29 dengan kategori **BB (Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja yang andal)

Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

- Terdapat ketidakselarasan target kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, atasan dan bawahan.
- Rencana Kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

b. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja sudah dilakukan, namun belum ada mekanisme dan validasi terhadap pengukuran kinerja tersebut dari masing-masing.
- Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, karena data kinerja belum disupervisi dan tervalidasi secara berjenjang oleh masing-masing atasan.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dari bawahan ke atasan belum dilakukan secara terjadwal, baru bersifat sewaktu-waktu.
- IKU belum dimanfaatkan sebagai dasar untuk penilaian kinerja.
- Indikator kinerja individu perlu dibuat sebagai ukuran kinerja individu.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja dalam LkjIP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

- Pengukuran data keuangan yang terkait dengan capaian kinerja.
- Pengungkapan analisis penggunaan sumber daya

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi atas program perlu dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi demi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

e. Capaian Kinerja

Pelaksanaan SAKIP sudah mulai mendorong RSUD untuk melakukan pengukuran capaian hasil (outcome) tetapi pencapaiannya masih belum maksimal.

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu penyelarasan target kinerja antara perjanjian kinerja dan rencana aksi serta antara atasan dan bawahan.
- b. Menjadikan target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan sebagai dasar pengajuan dan pengalokasian anggaran ke Bappeda.
- c. Menjadikan target kinerja Program dan Kegiatan sebagai dasar penentuan pengalokasian anggaran untuk masing-masing bidang.
- d. Menerapkan mekanisme dan validasi terhadap pengukuran kinerja tersebut dari masing-masing atasannya.
- e. Atasan memantau capaian kinerja secara periodik
- f. Membuat indikator kinerja individu sebagai ukuran kinerja individu.
- g. Pengungkapan analisis penggunaan sumber daya pada laporan LkjIP
- h. Melakukan evaluasi program
- i. Meningkatkan capaian program.

Tabel 14. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian			Penanggung Jawab	
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018		Capaian 2019
Pelayanan Gawat Darurat	Input	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%	90%	100%	100	100	Bidang Pelayanan Medik
		2. Pemberi pelayanan kegawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku : ATLS/BTLS/ ACLS/PPGD	100%	100%	75%	87%	93,2%	
		3. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	100%	100%	100%	100%	
	Proses	1. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	100%	100%	100%	100%	
		2. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit dilayani setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	
		3. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	4. Kematian pasien (≤ 8 jam) di IGD	≤ 2 per seribu (0,2%)	0,2%	0.2%	0,20%	2,3%	
	Outcome	5. Kepuasan Pelanggan	≥70%	70%	79,30%	80%	90,12%	
Pelayanan Rawat Jalan	Input	1. Ketersediaan Pelayanan	Minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS	100%	100%	100%	100%	Bidang Pelayanan Medik
		2. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dokter Spesialis	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Jam buka pelayanan dengan ketentuan	08.00 s.d. 13.00, setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 s.d. 11.00	100%	100%	100%	100%	
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤60 menit	100%	100%	100%	96%	
		5. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikrokospis	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	Tersedia dengan tenaga terlatih	100%	100%	100%	100%	
	Output	8. Peresepan obat sesuai formularium	100%	100%	90%	100%	100%	
		9. Terlaksananya keg. pencatatan & pelaporan TB di RS	≥60%	60%	100%	90%	100%	
	Outcome	10. Kepuasan Pelanggan	≥90%	90%	86%	93%	75,56%	
Pelayanan	Input	1. Ketersediaan Pelayanan	Sesuai jenis & kelas RS	100%	100%	100%	100%	Bidang

Jenis Pelayanan Rawat Inap	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian			Penanggung Jawab	
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018		Capaian 2019
		2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	Sesuai pola ketenagaan, jenis & kelas RS	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Medik
		3. Tempat tidur dengan pengaman	100%	100%	90%	90%	93%	
		4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	100%	95%	95%	95%	
	Proses	5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00	100%	100%	100%	100%	
		7. Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	1,5%	0.28%	0%	0%	
		8. Kejadian Infeksi Nosokomial	≤21%	21%	0.28%	2,30	2,57	
		9. Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	100%	100%	100	100	
		10. Pasien rawat inap tuberculosis yg ditangani dg startegi DOTS	100%	100%	100%	100	100	
		11. Pencatatan & pelaporan TB di RS	≥60%	60%	100%	100%	100%	
	Output	12. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	≤5%	5%	5.48%	4,67%	3,83%	
		13. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0,24%	0.82%	0,49%	0,21%	
	Outcome	14. Kepuasan pelanggan	≥ 90%	90%	77,11%	87%	90%	
	Pelayanan Bedah Sentral	Input	1. Ketersediaan tim bedah	Sesuai dengan kelas RS	100%	100%	100%	
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi			Sesuai dengan kelas RS	100%	100%	100%	100%	
3. Kemampuan melakukan tindakan operasi			Sesuai dengan kelas RS	100%	100%	100%	100%	
Proses		4. Waktu tunggu operasi elektif	≤2 hari	100%	100%	98%	98%	
		5. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>	≤6%	6%	0%	100%	100%	
Output		10. Kejadian kematian di meja operasi	≤1%	1%	0.0%	0,00%	0,00%	

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian				Penanggung Jawab
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	
	Outcome	11. Kepuasan pelanggan		80%	90%	90%	90%	
Persalinan dan Perinatologi	Input	1. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp.OG, Dokter umum, & bidan	100%	100%	100%	100%	Bidang Pelayanan Medik
		2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An	100%	100%	100%	100%	
		4. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr	100%	100%	93%	92%	96%	
		5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	100%	100%	91%	97%	97%	
		6. Pertolongan Persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	≤20%	20%	20%	19%	19%	
		7. Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	9. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1%	1%	0%	0,00%	0,00%	
			b. Pre-eklampsia <30%	30%	0%	0,00%	0,00%	
			c. Sepsis < 0,2%	0,2%	0%	0,00%	0,00%	
	Outcome	10. Kepuasan Pelanggan	≥80%	80%	72,37%	96%	96%	
Pelayanan Intensif	Input	1. Pemberi pelayanan	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	100%	100%	100%	Bidang Pelayanan Medik
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	100%	100%	100%	
		3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	100%	100%	100%	
	Proses	4. Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	100%	100%	100%	93%	
		5. Kejadian infeksi nosokomial	<9%	21%	0%	0,00%	0,00%	
	Output	6. Pasien yang kembali ke perawatan intensif dg kasus yg sama <72 jam	≤3%	3%	0%	0,87%	0,00%	
	Outcome	7. Kepuasan pelanggan	≥70%	70%	85%	100%	100%	
Pelayanan Radiologi	Input	1. Pemberi pelayanan radiologi	Dokter spesialis radiologi, radiografer	100%	58.33%	75.00%	75.00%	Bidang Penunjang
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi	Sesuai kelas RS	100%	63.64%	63.64%	63.64%	
	Proses	3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	≤3jam	100%	100%	100%	100%	
		4. Kerusakan foto	≤2%	2%	2.51%	2.51%	2.51%	

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian				Penanggung Jawab
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	
		5. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	6. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	Dokter spesialis radiologi	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	7. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	73,37%	84.00%	84.00%	
Pelayanan Patologi Klinik	Input	1. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	Sesuai kelas RS	100%	83.00%	17.0%	17.0%	Bidang Penunjang
		2. Fasilitas dan peralatan	Sesuai kelas RS	100%	81.1%	81.88%	81.88%	
	Proses	3. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik	≤120 menit	100%	100%	100%	100%	
		4. Tidak adanya kejadian tertukar specimen	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	Tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%	100%	100%	100%	
		6. Kemampuan mikroskopis TB Paru	Tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%	100%	100%	100%	
	Output	7. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dokter spesialis patologi klinis	100%	100%	100%	100%	
		8. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Kesesuaian baku mutu internal	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	10. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	94.50%	100%	100%	
Pelayanan Rehabilitasi Medik	Input	1. Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	Sesuai persyaratan kelas RS	100%	100%	100%	100%	Bidang Pelayanan Medik
		2. Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis	Sesuai persyaratan kelas RS	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	4. Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤50%	50%	50%	100%	100%	
	Outcome	5. Kepuasan Pelanggan	≥80%	80%	80%	90%	80,88%	
Pelayanan Farmasi	Input	1. Pemberi pelayanan farmasi	Sesuai kelas rumah sakit	100%	50.00%	50.0%	50.0%	Bidang Penunjang
		2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Sesuai kelas rumah sakit	100%	100%	81,25	87%	
		3. Ketersediaan formularium	Tersedia dan updated paling lama 3 thn.	100%	100%	100%	100%	
	Proses	4. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤30 menit	100%	100%	100%	100%	
		5. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤60 menit	100%	100%	100%	100%	

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian				Penanggung Jawab
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	
	Output							
	Outcome	6. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	90.83%	100%	100%	
Pelayanan Gizi	Input	1. Pemberi pelayanan gizi	Sesuai pola ketenagaan	100%	10.81%	89.19%	92%	Bidang Penunjang
		2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tersedia	100%	100%	75%	80%	
	Proses	3. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥90%	90%	95.50%	100%	100%	
		4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	99.50%	100%	100%	
	Output	5. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤20%	20%	20.00%	100%	100%	
	Outcome	6. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	95%	94,67%	93,56%	
Pelayanan Tranfusi Darah	Input	1. Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit	Sesuai standar BDRS	100%	16.67%	83.33%	87%	Bidang Penunjang
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit	Sesuai standar BDRS	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	0,01%	0,023%	0,021%	0,01%	
	Output	4. Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di RS	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	5. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	94%	95%	96%	
Pelayanan Pasien Keluarga Miskin	Input	1. Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	Tersedia	100%	100%	100%	100%	Bidang Pelayanan Medik
		2. Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	≤15 menit	100%	100%	100%	100%	
		4. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	5. Semua pasien keluarga miskin dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	6. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	100%	100%	100%	
Pelayanan Rekam Medik	Input	1. Pemberi pelayanan Rekam Medik	Sesuai persyaratan	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Usaha
	Proses	2. Waktu penyediaan dok. RM pel. rawat jalan	≤10 menit	100%	100%	100%	100%	
		3. Waktu penyediaan dok. RM pel. rawat inap	≤15 menit	100%	100%	100%	100%	
	Output	4. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	92%	95%	98%	
		5. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	6. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	81%	83%	87%	

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian			Penanggung Jawab	
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018		Capaian 2019
Pengelolaan Limbah	Input	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	Adanya SK direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 Th. 2004)	100%	100%	100%	100%	Bidang Sarana Prasarana
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit : padat dan cair	Sesuai peraturan perundangan.	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan.	100%	100%	100%	100%	
		4. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan.	100%	100%	100%	100%	
	Output	5. Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30mg/liter	100%	100%	100%	100%	
			b. COD < 80g/liter				100%	
			c. TSS < 30g/liter				100%	
			d. pH 6-9				100%	
Administrasi dan Manajemen	Input	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	≥90%	90%	93%	96%	96%	Bagian Tata Usaha
		2. Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	100%	100%	100%	100%	
		3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	100%	100%	100%	100%	
		4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	100%	100%	100%	100%	
		5. Adanya perencanaan startegi bisnis rumah sakit	Ada	100%	100%	100%	100%	
		6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	100%	100%	100%	100%	
	Proses	7. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	≥90%	90%	100%	100%	100%	
		11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	
		12. Kecepatan waktu pemberian informasi ttg tagihan pasien RI	≤2jam	100%	100%	100%	100%	
	Output	13. Cost recovery	≥60%	60%	43,34%	55,74 %	51,20 %	
		14. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	
		15. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam	≥60%	60%	16%	18%	23%	

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian				Penanggung Jawab
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	
		setahun						
		16. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah	Input	1. Waktu pelayanan <i>ambulance</i> /Kereta Jenazah	24 Jam	100%	100%	100%	100%	Bidang Penunjang
		2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah	Supir ambulans terlatih	100%	100%	100%	100%	
		3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	100%	20%	20%	20%	
	Proses	4. Kecepatan memberikan pelayanan <i>ambulance</i> /mobil Jenazah di Rumah Sakit	≤30 menit	100%	100%	100%	100%	
		5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	≤30 menit	100%	100%	100%	100%	
	Output	6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	100%	100%	99.84%	96%	96%	
	Outcome	7. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	96%	98%	99%	
Perawatan Jenazah	Input	1. Ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah	24 Jam	100%	100%	100%	100%	Bidang Penunjang
		2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah	Sesuai kelas rumah sakit	100%	35.71%	64.3%	65.7%	
		3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	Ada SK Direktur	100%	100%	100%	100%	
	Proses	4. Waktu tanggap (<i>response time</i>) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤15 menit setelah di kamar jenazah	100%	100%	100%	100%	
		5. Perawatan jenazah sesuai <i>standard universal precaution</i>	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	6. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	98%	96%	87%	
Pelayanan Laundry	Input	1. Ketersediaan pelayanan laundry	Tersedia	100%	100%	100%	100%	Bidang Penunjang
		2. Adanya penanggung jawab pelayanan laundry	Ada SK Direktur	100%	100%	100%	100%	
		3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	Tersedia	100%	100%	100%	100%	
	Proses	4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	6. Ketersediaan linen	2,5 - 3 set x jumlah tempat tidur	100%	100%	100%	100%	

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		STANDAR	Pencapaian				Penanggung Jawab
	Jenis	Uraian		Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	
		7. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Input	1. Adanya penanggung jawab IPSRS	SK Direktur	100%	100%	100%	100%	Bidang Sarana Prasarana
		2. Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit	$\geq 80\%$	80%	100%	100%	100%	
		4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	100%	100%	100%	100%	
	Output	6. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Input	1. Ada anggota tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75%	75%	77%	79%	89%	Bidang Pelayanan Medik
		2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/ departemen	$\geq 60\%$	60%	63%	63%	86%	
		3. Rencana program PPI	Ada	100%	100%	100%	100%	
	Proses	4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	100%	99%	100%	100%	
	Output	6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (<i>health care associated infections</i>) di rumah sakit (minimum 1 parameter)	$\geq 75\%$	75%	75%	75%	85%	
Pelayanan Keamanan	Input	1. Petugas keamanan bersertifikat pengamanan	100%	100%	25%	75%	75%	Bagian Tata Usaha
		2. Sistem pengamanan	Ada	100%	100%	100%	100%	
	Proses	3. Petugas keamanan melakukan keliling RS	Setiap jam	100%	100%	100%	100%	
		4. Evaluasi terhadap sistem pengamanan	Setiap 3 bulan	100%	99.7%	99.7%	100%	
	Output	5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome	6. Kepuasan pasien	$> 90\%$	90%	85%	95%	87%	

B. Realisasi Anggaran

1. Penerimaan/Pendapatan

Target dan realisasi penerimaan/pendapatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017 s.d 2019 sebagai berikut :

Tabel 15. Target dan realisasi penerimaan/pendapatan

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Target	75.000.000.000	85.365.000.000	106.734.340.200
Realisasi	62.581.107.484,64	80.353.251.760,86	77.927.694.218
%	83,44 %	94,12 %	73,01 %
Total Selisih	12.418.892.515,36	5.011.748.239	28.806.645.982

2. Anggaran Belanja

Anggaran Belanja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017 s.d 2019 sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Belanja

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Tidak Langsung	24.896.116.000	25.380.114.000	23.690.373.000
Langsung	134.322.034.000	127.516.134.000	161.934.772.000
Jumlah	159.218.150.000	152.896.248.000	185.625.145.000

Anggaran Belanja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017 s.d 2019 dan berdasarkan sumber anggaran :

Tabel 17. Anggaran Belanja

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	DAU	31.585.212.000	33.980.296.000	22.523.481.800
2.	DAK	47.201.338.000	30.899.306.000	44.247.323.000
3.	PADS	75.000.000.000	86.792.646.000	107.466.340.200
4.	DBH SDA Pertambangan	0	0	0
5.	SILPA Umum	0	40.500.000	700.000.000
	SILPA BLUD	0	0	4.800.000.000
	SILPA Khusus	3.000.000.000	0	0
6.	DBH Provinsi	0	0	2.000.000.000

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	DBH Pusat (Dana Bagi Hasil)	0	1.107.500.000	2.500.000.000
7.	Pendapatan Hibah	0	0	0
8.	Dana Penyesuaian	0	0	0
9.	DID	2.431.600.000	76.000.000	1.388.000.000
	Jumlah	159.218.150.000	152.896.248.000	185.625.145.000

3. Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan

No.	Tahun	Anggaran			Anggaran		
		Belanja Langsung (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Belanja Tidak Langsung (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2017	134.322.034.000	119.759.041.011	91,16	24.639.405.696	23.616.295.318	95,85
2	2018	127.516.134.000	120.757.298.943	94,70	25.380.114.000	24.992.139.270	98,47
3	2019	161.934.772.000	132.125.687.588	81,59	23.690.373.000	23.616.295.318	99,68

a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar sistem informasi di Rumah Sakit. Dengan adanya sistem informasi yang menyesuaikan kebutuhan rumah sakit sehingga dapat mempermudah kinerja pelayanan rumah sakit. Adapun salah satu tujuan dengan adanya penambahan system informasi yang baru agar SPM yang sudah ditargetkan bisa tercapai.

Pagu anggaran untuk kegiatan pada program ini adalah sebesar Rp.150.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 148.170.000,00 atau sebesar 98,78%. Adapun sumber dana dari kegiatan tersebut berasal dari dan APBD. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang layak dan memadai, yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah sakit, baik itu kunjungan rawat

jalan maupun kunjungan rawat inap dan juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Kegiatan pembangunan rumah sakit ini berfokus pada pembangunan satu buah gedung instalasi rawat jalan dan rawat inap 3 lantai yaitu pembangunan gedung Hemodialisa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan ruang rawat inap yang baik dan mempunyai ruangan yang cukup untuk menampung jumlah pasien yang mau dan akan dirawat di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Selain fokus pada pembangunan Gedung tersebut, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun juga merehab beberapa gedung rawat inap, antara lain rehabilitasi lanjutan gedung VIP, rehabilitasi gedung Instalasi Bedah Sentral, pemasangan teralis jendela, pembuatan taman, pembangunan Pos satpam, rehabilitasi selasar, rehabilitasi gedung bengkirai (kebidanan) dan pemasangan paving halaman IGD. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan di ruangan rawat inap dan rawat jalan itu sendiri.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.635.643.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 36.943.778.175 atau sebesar 98,16%. Realisasi tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Adapun sumber dana dari kegiatan tersebut berasal dana APBD sebesar Rp.4.750.000.000,00 dan dari dana APBN/DAK sebesar Rp.32.885.643.000,00.

2) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis di rumah sakit guna menunjang pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pengadaan alat-alat kedokteran ini juga bertujuan untuk memenuhi kelengkapan alat-alat kesehatan di rumah sakit dikarenakan RSUD Sultan Imanuddin yang sudah menjadi kelas B merupakan salah satu rumah sakit rujukan Regional untuk wilayah barat Kalimantan Tengah.

Pagu untuk anggaran alat-alat kesehatan rumah sakit bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp. 815.877.800,00 dan APBN/DAK Rp.8.517.500.000,00 dengan total Rp.9.333.377.800,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.9.302.641.083,00 atau sebesar 99,67%.

- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan alat-alat prasarana rumah sakit dan kebutuhan perlengkapan rumah sakit lainnya. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.248.855.000,00 dan realisasi keuangannya sebesar Rp.3.238.368.700,00 atau sebesar 99,68%.

c. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan cara meningkatkan kemampuan atau skil dokter dan paramedis melalui pelatihan, kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis. Program ini juga menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak mempunyai identitas sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di RSUD.

- 1) Kegiatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

Kegiatan ini diperuntukan untuk paramedis yang ingin menambah kemampuannya di bidang kesehatan melalui pelatihan *In House Training* yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dengan memanggil trainer dari luar daerah yang sudah teruji dan terlatih di bidang kesehatan. Pagu untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.154.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.153.370.000,00 atau 99,27%. Kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% dan pihak rumah sakit dapat melakukan efisiensi anggaran sehingga terlaksananya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pagu yang telah direncanakan.

- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

Kegiatan ini di diperuntukan untuk dokter dan paramedis yang ingin menambah skil atau kemampuannya di bidang kesehatan melalui kegiatan pelatihan dan Bimtek tenaga kesehatan di dalam dan luar daerah. Adapun kegiatan ini hanya di peruntukan untuk dokter dan paramedis saja. Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 352.287.269,00 atau

88,07%. Dari pagu tersebut pihak rumah sakit mampu melaksanakan *In House Training* yang diadakan di Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 2 kali kegiatan. Adapun dokter dan paramedis yang sudah terjadwal untuk mengikuti Bimtek di luar daerah juga sudah terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3) Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak mempunyai identitas sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Apabila sewaktu waktu terdapat pasien yang berobat baik itu rawat jalan maupun rawat inap yang tidak mempunyai BPJS kesehatan bahkan pasien dengan identitas Mr.X (tidak memiliki identitas sama sekali) maka rumah sakit akan menjamin biaya pengobatan pasien tersebut sesuai dengan kemampuan yang sudah dianggarkan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 601.201.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 502.573.928,00 atau sebesar 83,59%.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pelayanan dan kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD, dimana kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan BLUD selama kurun waktu 12 bulan pada tahun 2019 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) elemen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa BLUD dan Belanja Modal.

Pagu anggaran untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah Rp 106.734.340.200 dan terealisasi sebesar Rp 77.927.694.218 atau sebesar 73.01 %.

Beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan tahun 2019:

1. Pendapatan Farmasi, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya pengguna Jaminan Kesehatan Nasional khususnya BPJS sehingga pendapatan farmasi menjadi satu kesatuan paket klaim BPJS;
2. Klaim BPJS Kesehatan, secara angka per tahun menurun tapi jika dibandingkan per pelayanan meningkat, karena pendapatan Tahun 2018 yang berjumlah 55 M itu merupakan pendapatan klaim 12 bulan

pelayanan (Oktober 2017 sd September 2018) sedangkan pendapatan Tahun 2019 yang berjumlah 55 M merupakan pendapatan klaim 11 bulan pelayanan (Oktober 2018 sd Agustus 2019);

3. Ruang Perawatan, beberapa pendapatan ruang perawatan menurun seiring meningkatnya pasien pengguna JKN khususnya BPJS Kesehatan;
4. Beberapa Poliklinik, antara lain Klinik Orthopedi dan Poli Psikologi, hal ini disebabkan antara lain Tahun 2018 masih ada Spesialis Orthopedi sedangkan akhir tahun 2018 yang bersangkutan telah pindah sedangkan pada poli psikologi disebabkan antara lain pasien pindah ke poli Jiwa karena telah adanya Psikiater (Spesialis Kejiwaan) ;
5. Pendapatan Lainnya, antara lain RSUD sudah tidak lagi mengelola Pendapatan Sewa Ruangan dan pendapatan lain seperti pembuatan Surat Keterangan dan sejenisnya karena sudah masuk paket pemeriksaan dan pelayanan lain.

Simpulan: jika pembayaran Klaim BPJS tidak terlambat atau sama dengan pembayaran bulan klaim tahun sebelumnya, maka Total Realisasi Pendapatan Tahun 2019 akan mengalami peningkatan sekitar 5 M dari tahun sebelumnya.

Upaya peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan tata kelola baik sumber daya manusia, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana serta penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program kesehatan, kondisi lingkungan strategis, kependudukan, pendidikan, kemiskinan, dan perkembangan baru lainnya.

Tabel 19. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Target	Keuangan	%	Fisik (%)				Target	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standart pelayanan kesehatan	%	150.000.000	100	148.170.000	98,78	100	Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah standar pelayanan kesehatan yang disusun	Buku	6	-	-	-	
								Penyusunan Standar Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Sistem Informasi	2	150.000.000	148.170.000	98,78	100
								Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan lain yang mengikuti Bimtek	OK	4	-	-	-	-
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	50.217.875.800	100	49.484.787.958	98,54	100	Pembangunan rumah sakit (SARPRAS)	Jumlah sarpras RS yang dibangun	Unit	8	37.635.643.000	36.943.778.175	98,16	100
								Pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah alat-alat rumah sakit yang diadakan (Aspak)	Unit	1250	9.333.377.800	9.302.641.083	99,67	100

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Target	Keuangan	%	Fisik (%)				Target	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
								Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	Unit	15	3.248.855.000	3.238.368.700	99,68	100
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	%	1.155.701.400	100	1.008.231.197	87,24	100	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Jumlah Pegawai RSSI yang mengikuti in house training pelayanan medik	OK	50	154.500.000	153.370.000	99,27	100
								Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	Jumlah dokter dan para medis yang mengikuti seminar, workshop, pelatihan	OK	22	400.000.000	352.287.269	88,07	90
								Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah pasien kurang mampu yang mendapatkan bantuan pelayanan	Orang	70	601.201.400	502.573.928	83,59	85,36

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Target	Keuangan	%	Fisik (%)				Target	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
Program Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat-obatan dan perbekalan medis di rumah sakit	%	-	-	-	-	-	Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan sesuai formularium RSUD	Jenis	-	-	-	-	-
								Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pelatihan dan workshop tentang farmasi	Kegiatan	-	-	-	-	-
Program peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat (BLUD)	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	%	106.734.340.200	90	77.927.694.218	73,01	77,48	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di RSUD	Jumlah unit layanan yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	Unit	90	106.734.340.200	77.927.694.218	73,01	77,48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	664.620.000	100	650.165.241	97,83	99,54	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	Paket/surat	180				
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12				

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Target	Keuangan	%	Fisik (%)				Target	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa dan peralatan kantor yang tersedia	Unit	8	-	-	-	-
								Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	12	38.620.000	35.518.000	91,97	92,05
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	12	61.000.000	59.576.000	97,67	100
								Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	12	-	-	-	-
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	12	200.000.000	199.346.200	99,67	100
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	10	140.000.000	131.010.000	93,58	100

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satu an Tar get	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Tar get	Keuangan	%	Fisik (%)				Tar get	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	12	225.000.000	224.715.041	99,87	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	2.138.326.300	100	2.118.875.700	99,09	100	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	Unit	1	-	-	-	-
								Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasion al yang diadakan	Unit	2	342.600.000	342.600.000	100	100
								Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis/Unit	3	660.346.000	647.870.500	98,11	100
								Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	Jenis/Unit	3	292.690.300	291.190.300	99,49	100
								Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis/Unit	6	842.690.000	837.214.900	99,35	100

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Target	Keuangan	%	Fisik (%)				Target	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
								Rehabilitas sedang/berat rumah dinas/jabatan	Jumlah rumah dinas/jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	Unit per tahun	2	-	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	186.017.000		184.463.950	99,17	100	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	Unit	4	-	-	-	
								Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	551	186.017.000	184.463.950	99,17	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	628.000.000	100	543.408.124	86,53	97,69	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	OK	24	628.000.000	543.408.124	86,53	97,69

PROGRAM (Eselon III)								KEGIATAN (Eselon IV)							
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019			Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Tahun 2019		Capaian 2019		
			Pagu (Rp)	Target	Keuangan	%	Fisik (%)				Target	Pagu (Rp)	Keuangan	%	Fisik (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	59.891.300	100	59.891.300	100	100	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	6	26.000.000	26.000.000	100	100
								Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan	6	-	-	-	-
								Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	6	33.891.300	33.891.200	100	100

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja RSSI Pangkalan Bun tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dari jumlah 10 indikator, 1 indikator dengan kategori capaian sangat berhasil, 8 indikator dengan capaian berhasil dan 1 indikator yaitu pada CRR dengan capaian indikator kurang berhasil.

B. Solusi Atas Permasalahan

Untuk terus meningkatkan kinerja Rumah Sakit Sultan Imanudin pada masa mendatang dibuat strategi:

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai dengan standar rumah sakit kelas B, misalnya dokter spesialis Jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis urologi, bedah syaraf, patologi anatomi, dokter spesialis radiologi dan dokter-dokter spesialis lainnya;
2. Memenuhi sarana dan prasarana bangunan gedung perawatan dan alat kesehatan / kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas B;
3. Meningkatkan Pendapatan BLUD untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit yaitu belanja rutin dan kebutuhan obat-obatan, bahan, alat kesehatan habis pakai dengan upaya inovasi pelayanan dan mempertahankan mutu guna menambah nilai pendapatan RS.

Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung
5. Laporan Realisasi Anggaran
6. Apresiasi yang Pernah Diterima
7. SOP penyusunan LKjIP

**1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah
Tentang Indikator Kinerja Utama**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**
Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN**

NOMOR : RS/U.19.06.1126 .I.3

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
TAHUN 2019-2022**

DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017-2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan

- diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | |
|--------|--|
| KESATU | : Perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini |
| KEDUA | : Perubahan IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi |

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017- 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 September 2019

Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 00

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : RS/U.19.06.1126.I.3
Tanggal : 27 September 2019

1. Unit Kerja : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

2. Tugas Pokok : Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun wajib melakukan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan upaya kesehatan perorangan yang kelompok dalam:
 - a.1. Bidang Sarana Prasarana
 - a.2. Bidang Pelayanan Medik
 - a.3. Bidang Penunjang
- b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang upaya kesehatan rujukan
- c. Pengelolaan sumber daya manusia
- d. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100.	Laporan Hasil Survei Komisi Akreditasi RS	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	Laporan realisasi BOR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	Laporan realisasi LOS	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	TOI	Turn Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	Laporan realisasi TOI	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	BTO	Bed Turn Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	Laporan realisasi BTO	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	Laporan realisasi NDR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	Laporan realisasi GDR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery = Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran	Laporan realisasi CRR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun	
	Persentase indikator Pelayanan (SPM) yang mencapai target	Capaian Standar Minimal yang mencapai target	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus.	Laporan realisasi SPM	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	Indeks Masyarakat Kepuasan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun	



Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 00

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN B UN
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%
		BOR	60-85%
		LOS	6-9 hari
		TOI	1-3 hari
		BTO	40-50 kali
		NDR	25/1000
		GDR	45/1000
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%

3. Perjanjian Kinerja (PK)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. FACHRUDDIN**
Jabatan : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. NURHIDAYAH, SH, MH**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019


Pihak Kedua
Bupati Kotawaringin
Barat,



**Hj. NURHIDAYAH,
SH, MH**



Pihak Pertama,
Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN


Nama : dr. FACHRUDDIN

Jabatan : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2019 (%)
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80 %
		BOR	60-85%
		LOS	6-9 hari
		TOI	1-3 hari
		BTO	40-50 kali
		NDR	25/1000
		GDR	45/1000
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%

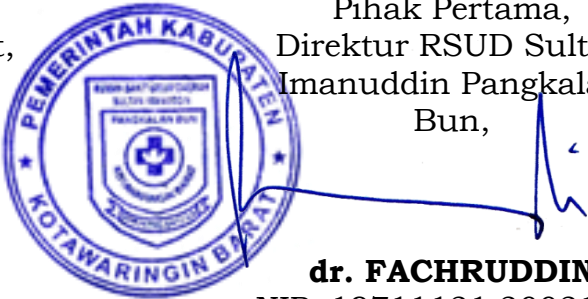
No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	664.620.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.138.326.300,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	186.017.000,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	628.000.000,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.891.300,00
6.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00
7.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50.217.875.800,00
8.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.155.701.400,00
9.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	0
10.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	106.734.340.200,00
Jumlah		161.934.772.000,00

Pihak Kedua
Bupati Kotawaringin Barat,



Hj. NURHIDAYAH, SH,
MH

Pihak Pertama,
Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan
Bun,



dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1
005



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.

Jabatan : 19680818 198803 2 001

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. FACHRUDDIN

Jabatan : 19711121 200212 1 005

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019



Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Pihak Pertama,

Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680818 198803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

No.	Sasaran Program	Indikator	Target (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Presentasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan sarana prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100
3.	Meningkatnya kepatuhan aparatur	Presentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	100
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100
5.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100
6.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	90

No.	Program	Anggaran (Rp)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	664.620.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.138.326.300,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	186.017.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	628.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.891.300,00
	Program peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat (BLUD)	
	Divisi Pendidikan dan Pelatihan	1.827.473.000,00
	Divisi SIMRS dan Pemasaran Sosial	629.439.955,00
	Divisi Administrasi Umum	533.338.832,00
	Divisi Kepegawaian	132.158.000,00
	Divisi Promosi	438.020.000,00
	Sub Bagian Keuangan	62.900.747.414,00
	Sub Bagian Perencanaan	56.980.000,00
Jumlah		70.195.011.801,00

Pangkalan Bun, September 2019



Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Pihak Pertama,

**Hj. URIP SANTOSO, S.H.,
M.H.**

NIP. 19680818 198803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AVRIAZAR BENG KIUK, SKM.,MPH**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pengendalian Program**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680818 198803 2 001

Pihak Pertama,

AVRIAZAR BENG KIUK, SKM.,MPH
NIP. 19800406 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : AVRIAZAR BENG KIUK, SKM.,MPH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pengendalian Program

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Rencana Kerja (Renja) yang disusun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun	1 Dokumen RKA
3.	Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	1 Dokumen DPA
5.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK)	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun	1 Dokumen
6.	Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang disusun	1 Dokumen
7.	Tersusunnya Rencana Aksi Program dan Kegiatan	Jumlah Rencana Aksi Program dan Kegiatan yang disusun	1 Dokumen
8.	Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)	Jumlah Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang disusun	1 Dokumen
9.	Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)	Jumlah Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) yang disusun	1 Dokumen
10.	Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan	Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan yang disusun	1 Dokumen
11.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun	1 Dokumen
12.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan yang disusun	1 Dokumen
13.	Tersusunnya LKPJ Bupati	Jumlah LKPJ Bupati yang disusun	1 Dokumen
14.	Tersusunnya LPPD	Jumlah LPPD yang disusun	1 Dokumen
15.	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(LKjIP)	yang disusun	
16.	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	Jumlah Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang disusun	1 Laporan
17.	Tersusunnya Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang disusun	1 Laporan
18.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	1 Laporan
19.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit Perencanaan dan Pengendalian program yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	1 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RSUD	0
2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	56.980.000,00
	Jumlah	56.980.000,00

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,



Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.
NIP: 19680818 198803 2 001

Pihak Pertama,



AVRIAZAR BENG KIUK, SKM.,MPH
NIP. 19800406 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAKHMAD SUCAHYO, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680818 198803 2 001

Pihak Pertama,

RAKHMAD SUCAHYO, SKM, M.Kes
NIP. 19690408 199203 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : RAKHMAD SUCAHYO, SKM, M.Kes

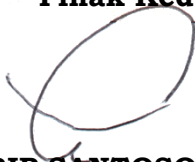
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Perlengkapan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan yang disediakan	12 bulan
2.	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan
3.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 jenis
5.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 kali
6.	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	2 unit
7.	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 jenis
8.	Terlaksananya Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	5 jenis
9.	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis
10.	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	551 stel
11.	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24 OK
12.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	Jumlah unit layanan UKP yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	5 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	38.620.000,00
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.000.000,00
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000,00
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000,00
5.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	225.000.000,00
6.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	342.326.300,00
7.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	660.346.000,00
8.	Pengadaan meubelair	292.690.300,00
9.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	842.690.000,00
10.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	166.296.000,00
11.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	628.000.000,00
12.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	
	a. Divisi Pendidikan dan Pelatihan	1.827.473.000,00
	b. Divisi SIMRS dan Pemasaran Sosial	629.439.955,00
	c. Divisi Administrasi Umum	533.338.832,00
	d. Divisi Kepegawaian	132.158.000,00
	e. Divisi Promosi	438.020.000,00
	f. Instalasi Rekam Medik	1.405.499.500,00
	Jumlah	8.562.897.887,00

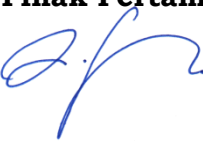
Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,



Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.
NIP: 19680818 198803 2 001

Pihak Pertama,



RAKHMAD SUCAHYO, SKM, M.Kes.
NIP. 19690408 199203 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOGIE KURNIAWAN, S.E., M.Ec.Dev.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.
NIP: 19680818 198803 2 001

Pihak Pertama,

YOGIE KURNIAWAN, S.E., M.Ec.Dev.
NIP. 19861111 200903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : YOGIE KURNIAWAN, S.E., M.Ec.Dev.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok
2.	Tersusunnya laporan keuangan semesteran tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan semesteran	1 dok
3.	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit keuangan yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	1 unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000,00
4.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	62.900.747.414,00
Jumlah		62.960.747.414,00

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,



Hj. URIP SANTOSO, S.H., M.H.
NIP: 19680818 198803 2 001

Pihak Pertama,



YOGIE KURNIAWAN, S.E., M.Ec.Dev.
NIP. 19861111 200903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARDIANTO, S.T.

Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. FACHRUDDIN

Jabatan : DIREKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Pertama,

KARDIANTO, S.T.

NIP. 196305061985031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : KARDIANTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana

No.	Sasaran Program	Indikator	Target (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana Rumah Sakit	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100
2.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	90

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50.217.875.800,00
2.	Program peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat (BLUD)	
	a. Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)	4.920.411.661,00
	b. Divisi Logistik dan Perbekalan	13.000.000,00
Jumlah		55.151.287.461,00



Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Pertama,

KARDIANTO, S.T.
NIP. 196305061985031010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SONNY SAPUTRA, S.KM.**

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KARDIANTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

KARDIANTO, S.T.
NIP: 196305061985031010

Pihak Pertama,

SONNY SAPUTRA, S.KM.
NIP. 19750508 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : SONNY SAPUTRA, S.KM.


Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah pembangunan Rumah Sakit	1 unit
2.	Tersedianya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Jumlah pembangunan Rumah Sakit	2 Jenis
3.	Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan	Jumlah alat-alat rumah sakit yang diadakan (Aspak)	25 Unit
4.	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan kedokteran (DAK)	Jumlah alat-alat rumah sakit yang diadakan (Aspak)	39 Unit
5.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit layanan IPRS yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	1 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan ruang rawat inap 5 lantai tahap 2, pembagunan gedung layanan, pembangunan pagar.	4.450.000.000,00
2.	Pembangunan Rumah Sakit (DAK)	32.885.643.000,00
3.	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	815.877.800,00
4.	Pengadaan alat kesehatan kedokteran (DAK)	8.517.500.000,00
5.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	4.920.411.661,00
Jumlah		51.589.432.461,00


Pangkalan Bun, September 2018

Pihak Kedua,



KARDIANTO, S.T.
NIP. 196305061985031010

Pihak Pertama,



SONNY SAPUTRA, S.KM.
NIP. 19750508 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS JAMALUDIN, SKM., MPH.**

Jabatan : Kepala Seksi Logistik dan Perbekalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KARDIANTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

KARDIANTO, S.T.
NIP. 196305061985031010

Pihak Pertama,

AGUS JAMALUDIN, SKM., MPH.
NIP. 19830508 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : AGUS JAMALUDIN, SKM., MPH.


Jabatan : Kepala Seksi Logistik & Perbekalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	12 Jenis
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit layanan Logistik yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	1 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	404.675.000,00
2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	13.000.000,00
Jumlah		417.675.000,00


Pangkalan Bun, September 2018

Pihak Kedua,



KARDIANTO, S.T.
NIP. 196305061985031010

Pihak Pertama,



AGUS JAMALUDIN, SKM., MPH.
NIP. 19830508 200903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. EMMA, Sp.PK.

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. FACHRUDDIN

Jabatan : DIREKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Pertama,

dr. EMMA, Sp.PK.

NIP. 19731217 200501 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : dr. EMMA, Sp.PK.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik

No.	Sasaran Program	Indikator	Target (%)
1.	Meningkatnya standart pelayanan kesehatan	Persentase standart pelayanan kesehatan	100
2.	Meningkatnya mutu kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100
3.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	90

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00
2.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.155.701.400,00
3.	Program peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat (BLUD)	
	a. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)	578.954.979,00
	b. Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	644.290.000,00
	c. Unit Pelayanan Instalasi Fisioterapi/ Rehabilitasi Medik	42.720.000,00
	d. Unit Pelayanan Instalasi Hemodialisa	1.207.361.950,00
	e. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Inap	1.737.650.000,00
	f. Unit Perawatan Intensif (ICU)	33.000.000,00
	g. Unit Pelayanan Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi	195.800.000,00
Jumlah		5.745.478.329,00




Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Pertama,



dr. EMMA, Sp.PK.
NIP. 19731217 200501 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AYU MIARSIH, S.Kep.Ners.**

Jabatan : **Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. EMMA, Sp.PK.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

dr. EMMA, Sp.PK.
NIP. 197312172005012008

Pihak Pertama,

AYU MIARSIH, S.Kep.Ners.
NIP. 197402081998032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : AYU MIARSIH, S.Kep.Ners.


Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terbuatnya aplikasi SIM RS (E Medical Record dan E Resep)	Jumlah Pengembangan SIM RS (E Medical Record dan E Resep)	1 Aplikasi
2.	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah pegawai RS yang mengikuti kursus singkat / pelatihan	40 OK
3.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit layanan rawat jalan yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	4 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan Standar Kesehatan	150.000.000,00
2.	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	400.000.000,00
3.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	
	a. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)	578.954.979,00
	b. Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	644.290.000,00
	c. Unit Pelayanan Instalasi Fisioterapi/Rehabilitasi Medik	42.720.000,00
	d. Unit Pelayanan Instalasi Hemodialisa	1.207.361.950,00
Jumlah		3.023.326.929,00

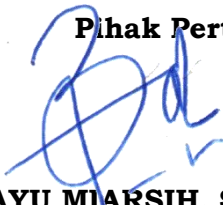
Pangkalan Bun, September 2018

Pihak Kedua,



dr. EMMA, Sp.PK.
NIP. 197312172005012008

Pihak Pertama,



AYU MIARSIH, S.Kep.Ners.
NIP. 197402081998032007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AIMANDINATA, S.Kep.**

Jabatan : **Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. EMMA, Sp.PK.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

dr. EMMA, Sp.PK.
NIP. 197312172005012008

Pihak Pertama,

AIMANDINATA, S.Kep.
NIP. 197212271993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : AIMANDINATA, S.Kep.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah standar pelayanan kesehatan yang yang disusun	6 Buku
2.	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan lain yang mengikuti Bimtek	22 Orang
3.	Terlaksananya kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Jumlah Pegawai RSSI yang mengikuti in house training pelayanan medik	50 OK
4.	Terlaksananya kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah pasien kurang mampu yang mendapatkan bantuan pelayanan	60 Orang
5.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit layanan Rawat Inap yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	3 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	0
2.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	0
3.	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	154.500.000,00
4.	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	601.201.400,00
5.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	
	a. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Inap	1.737.650.000,00
	b. Unit Perawatan Intensif (ICU)	33.000.000,00
	c. Unit Pelayanan Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi	195.800.000,00
Jumlah		2.788.326.929,00

Pangkalan Bun, September 2018

Pihak Kedua,



dr. EMMA, Sp.PK.
NIP. 197312172005012008

Pihak Pertama,



AIMANDINATA, S.Kep.
NIP. 197212271993031007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARDINO, S.Kep.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENUNJANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. FACHRUDDIN

Jabatan : DIREKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Pertama,

HARDINO, S.Kep.

NIP. 19730520 199303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : HARDINO, S.Kep.

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang

No.	Sasaran Program	Indikator	Target (%)
1.	Meningkatnya mutu ketersediaan obat-obatan dan perbekalan medis di rumah sakit	Persentase ketersediaan obat-obatan dan perbekalan medis di rumah sakit	100
2.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	90

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	0
2.	Program peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat (BLUD)	
	a. Laundry	540.271.982,00
	b. Divisi Transportasi	275.485.200,00
	c. Divisi CSSD	1.177.799.733,00
	d. Instalasi Pemulasaraan Jenazah	14.690.000,00
	e. Instalasi Gizi	1.940.138.300,00
	f. Instalasi Laboratorium	1.667.421.265,00
	g. Instalasi Radiologi	1.203.137.348,00
	h. Instalasi Farmasi	21.074.036.571,00
	i. Instalasi Rekam Medik	1.405.499.500,00
	j. Unit Bank Darah	1.544.514.510,00
Jumlah		30.842.994.409,00




Pihak Kedua,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Pertama,



HARDINO, S.Kep.

NIP. 19730520 199303 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIA ANDRIYANI, S.Farm., Apt., M.PH**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HARDINO, S.Kep.

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,


HARDINO, S.Kep.
NIP. 197305201993031008

Pihak Pertama,


MIA ANDRIYANI, S.Farm., Apt., M.PH
NIP. 19820327 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : MIA ANDRIYANI, S.Farm., Apt., M.PH


Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadaan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan sesuai formularium RSUD	856 Jenis
2.	Meningkatnya Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pelatihan dan workshop tentang farmasi	3 Keg
3.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit layanan penunjang pelayanan medik yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	6 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan	0
2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	
	a. Instalasi Gizi	1.940.138.300,00
	b. Instalasi Laboratorium	1.667.421.265,00
	c. Instalasi Radiologi	1.203.137.348,00
	d. Instalasi Farmasi	21.074.036.571,00
	e. Unit Bank Darah	1.544.514.510,00
Jumlah		27.429.247.994,00

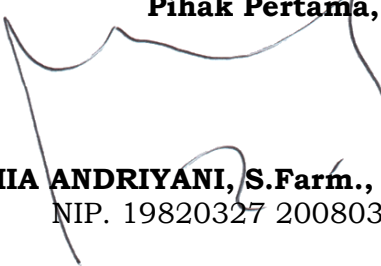
Pangkalan Bun, September 2018

Pihak Kedua,



HARDINO, S.Kep.
NIP. 197305201993031008

Pihak Pertama,



MIA ANDRIYANI, S.Farm., Apt., M.PH
NIP. 19820327 200803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**

Jabatan : **Kepala Seksi Pelayanan Non Medis**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARDINO, S.Kep.**

Jabatan : **Kepala Bidang Penunjang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, September 2019

Pihak Kedua,

HARDINO, S.Kep.
NIP. 197305201993031008

Pihak Pertama,

GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.
NIP. 197309251993031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Non Medis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah unit layanan penunjang pelayanan medik yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai standar	4 Unit

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD (BLUD)	
	a. Laundry	540.271.982,00
	b. Divisi Transportasi	275.485.200,00
	c. Divisi CSSD	1.177.799.733,00
	d. Instalasi Pemulasaraan Jenazah	14.690.000,00
	Jumlah	2.008.246.915,00


Pangkalan Bun, September 2018

Pihak Kedua,



HARDINO, S.Kep.
NIP. 197305201993031008

Pihak Pertama,



GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.
NIP. 197309251993031002

4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung

- a. Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi



The banner features a background image of the RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun building. At the top left is the RSUD logo and name. At the top right is the KARS logo and name. The main title is in large, bold, blue and yellow letters. Below the title is a slogan in red. At the bottom left is a circular seal with the text 'AKREDITASI PARIPURNA TETAP BISA!!!'. At the bottom right is the surveyor's name and date. At the very bottom are social media and contact details.

RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

KARS
Komisi Akreditasi Rumah Sakit

SURVEI VERIFIKASI AKREDITASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
TAHUN 2019

PELAYANAN MEMUASKAN ADALAH TEKAD KAMI

Surveior :
Luh Gede Sukaningsih, S.Kep., Ners.
Pangkalan Bun, 27 November 2019

AKREDITASI PARIPURNA TETAP BISA !!!

<https://www.facebook.com/rsud.pangkalanbun> | 0532 - 21404 | Fax : 0532 - 23581
<https://rssl.kotawaringinbarat.kab.go.id> | rsudpbun@gmail.com



316 Temuan

Standar	Jumlah Temuan	Pencapaian Hari Ini
APK	37	94,5%
AP	63	90%
PP	20	90%
PAB	11	100%
MKI	38	90%
PMKP	12	91,6%
MPO	11	90%
KPS	16	93,75%



Standar	Jumlah Temuan	Pencapaian Hari Ini
TKP	13	84%
MFK	22	95%
SKP	6	96%
HPK	35	90%
PPK	9	100%
MDGS	3	100%
PPI	20	90%
TOTAL	316	92,99%



Komisi Akreditasi Rumah Sakit

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/943/XII/2017

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan :

LULUS TINGKAT:

PARIPURNA



Kepada :

Nama Rumah Sakit : **RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun**
Alamat : **Jl. Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun**
Provinsi Kalimantan Tengah
Berlaku : **sampai dengan 20 NOVEMBER 2020**

Jakarta, 22 Desember 2017
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif

Dr. dr. Sutoto, M.Kes



b. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Calk, Neraca, LRA,) Untuk Indikator CRR



DAFTAR ISI

Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Neraca
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
2.1 Kebijakan Teknis
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi
BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
4.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran
4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional
4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas
4.1.2 Penjelasan pos pos Neraca
4.2 Informasi Tambahan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun |


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan RSUD Sultan Imanuddin Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 2020

Pengguna Anggaran,


dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 005



Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun |

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun adalah Entitas Akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

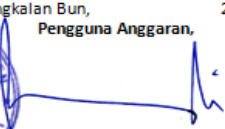
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 79.691.880.765,43 atau 78,18 persen dari yang ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2019. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp.

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun |

155.723.776.448,62 atau 83,89 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2019

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, Total Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 127.098.343.568,83 dan Beban LO adalah sebesar Rp. 128.189.120.627,67
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar (Rp. 30.855.034.496,70).
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 307.530.609.949,04 dan Kewajiban sebesar Rp. 19.377.211.612,00 sehingga Ekuitas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 288.153.398.337,04
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pangkalan Bun,
Pengguna Anggaran,
2020

dr. FACHRUDDIN
NIP. 19711121 200212 1 005

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun |

LRA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN						
TAHUN ANGGARAN 2019						

Pangkalan Bun, 2020

Pengguna Anggaran,

dr. FACHRUDDIN

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT						
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN						
NERACA						
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018						
					(dalam Rupiah)	
NO	URAIAN				31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR					
		Kas dan Setara Kas				-
		Kas Yang Dibatasi Penggunaannya				-
		Kas Di Bendahara Pengeluaran		-		1.000,00
		Kas Di Bendahara Penerimaan		36.000.000,00		184.800.000,00
		Kas JKN				
		Kas BLUD		7.905.322.444,51		6.049.250.778,04
		Kas BOS				
		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran				
		Investasi Jangka Pendek				
		Piutang Pajak				
		Piutang Retribusi		-		12.000.000,00
		Penyisihan Piutang				
		Beban Dibayar Di muka				
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				
		Piutang Lainnya		22.633.690.498,75		15.826.236.063,05
		Penyisihan Piutang Lainnya		(1.982.905.969,72)		(1.738.310.479,17)
		Persediaan		7.077.846.181,42		7.804.128.844,10
		Jumlah Aset Lancar		35.669.953.154,96		28.138.106.206,02
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
		Investasi Non Permanen				
		Investasi Permanen				
		Jumlah Investasi Jangka Panjang		-		-
1.3	ASET TETAP					
		Tanah		43.585.632.480,00		43.314.120.400,00
		Peralatan dan Mesin		159.160.401.106,13		99.711.758.284,29
		Gedung dan Bangunan		98.718.753.585,85		77.215.283.578,85
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		23.759.195.463,94		12.041.103.244,94
		Aset Tetap Lainnya		206.756.365,00		206.756.365,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		25.251.214.489,84		24.568.418.489,84
		Akumulasi Penyusutan		(80.309.675.696,68)		(61.545.764.289,68)
		Jumlah Aset Tetap		270.372.277.794,08		195.511.676.073,24

1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		-
	Tuntutan Ganti Rugi		-
	Tagihan Lainnya		-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-
	Aset Tak Berwujud	1.180.480.000,00	1.032.310.000,00
	Amortisasi	(624.981.000,00)	(418.519.000,00)
	Aset Lain-lain	994.620.000,00	994.620.000,00
	Akumulasi Aset Rusak Berat	(61.740.000,00)	(61.740.000,00)
	Jumlah Aset Lainnya	1.488.379.000,00	1.608.411.000,00
	JUMLAH ASET	307.530.609.949,04	225.258.193.279,26
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	500,00	351.838,34
	Pendapatan Diterima Di Muka	46.600.000,00	81.400.000,00
	Utang Belanja	19.330.611.112,00	14.670.330.274,90
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	19.377.211.612,00	14.752.082.113,24
	JUMLAH KEWAJIBAN	19.377.211.612,00	14.752.082.113,24
3.	EKUITAS	288.153.398.337,04	210.444.371.166,02
3.1.1.01	EKUITAS	(30.855.034.496,70)	(30.926.741.779,88)
3.1.3.01	RK-PPKD	319.008.432.833,74	241.371.112.945,90
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	307.530.609.949,04	225.196.453.279,26

Pangkalan Bun, 2020

Pengguna Anggaran,



dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 005

Capaian Cost Recovery Rate RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

No	Tahun	Satuan	Target	Perhitungan (Total Realisasi Pendapatan)/(Total Realisasi Belanja)	Capaian
4.	2017	%	>=60%	62.570.315.255,65	43,34%
				144.361.630.848,23	
5.	2018	%	>=60%	80.353.251.760,98	55,74 %
				144.150.859.702,84	
6.	2019	%	>=60%	79.723.080.765,43	51,20 %
				155.723.776.448,12	

- c. FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey



2019

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Semester I Tahun 2019



Hasil Pelaksanaan Survey IKM Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM yang berkisar antara 65,00 – 76,60. Nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 76,74.
2. Hasil survei menunjukkan hanya ada 5 unsur pelayanan yang dipersepsikan Baik oleh masyarakat dengan nilai IKM yang berkisar antara 76,61 – 88,30. Unsur-unsur pelayanan tersebut meliputi 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif Pelayanan, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Perilaku Pelaksana dan 5) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Unsur pelayanan yang masuk dalam kategori yang dipersepsikan oleh masyarakat Kurang Baik dengan nilai IKM berkisar antara 65,00 – 76,60 yaitu 1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 4) Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu unsur-unsur pelayanan tersebut harus segera diperbaiki.
4. Nilai IKM pada unit-unit pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin yang dipersepsikan oleh masyarakat Sangat Baik dan Baik ada 7 unit pelayanan yaitu Instalasi Gawat Darurat, Perinatologi dan Persalinan, Instalasi Rehabilitasi Medik, Unit Hemodialisa kemudian diikuti oleh Ruang dan Ruang Perawatan Akasia dan Ruang Perawatan Lanan.
5. Unit pelayanan yang dipersepsikan masyarakat Kurang baik adalah Instalasi Laboratorium, Ruang Perawatan Sindur, Ruang Perawatan VIP, ICU, Instalasi Radiologi, Perawatan Meranti, Instalasi Bedah memiliki dan Instalasi Rawat Jalan.

B. Rekomendasi

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama dalam

5. Laporan Realisasi Anggaran

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PADA SETIAP PROGRAM

NO	URAIAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI			KET
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	664,620,000	99.54	97.83	650,165,241	Program Rutin
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,138,326,300	100.00	99.09	2,118,875,700	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	186,017,000	100.00	99.17	184,463,950	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	628,000,000	97.69	86.53	543,408,124	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,891,300	100.00	100.00	59,891,200	
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150,000,000	100.00	98.78	148,170,000	Program Pokok
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50,217,875,800	100.00	98.54	49,484,787,958	
8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1,155,701,400	88.92	87.24	1,008,231,197	
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)	106,734,340,200	77.48	73.01	77,927,694,218	
	TOTAL PAGU, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	161,934,772,000	85.07	81.59	132,125,687,588	

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PADA SETIAP
PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN OBJEK BELANJA
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2019**

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	%	Rp.
5.2	BELANJA LANGSUNG	161,934,772,000.00	85.07	81.59	132,125,687,588.12
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	664,620,000.00	99.54	97.83	650,165,241.00
1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	38,620,000.00	92.05	91.97	35,518,000.00
5.2.1	Belanja Pegawai	33,550,000.00	100.00	100.00	33,550,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS	33,550,000.00	100.00	100.00	33,550,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15,300,000.00	100.00	100.00	15,300,000.00
5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	18,250,000.00	100.00	100.00	18,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,070,000.00	39.45	38.82	1,968,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,070,000.00	39.45	38.82	1,968,000.00
5.2.2.01.03	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,070,000.00	39.45	38.82	1,968,000.00
1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61,000,000.00	100.00	97.67	59,576,000.00
5.2.3	Belanja Modal	61,000,000.00	100.00	97.67	59,576,000.00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	61,000,000.00	100.00	97.67	59,576,000.00
5.2.3.14.12	Belanja modal Pengadaan tempat sampah	61,000,000.00	100.00	97.67	59,576,000.00
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00	100.00	99.67	199,346,200.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000.00	100.00	99.67	199,346,200.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00	100.00	99.67	199,346,200.00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000,000.00	100.00	99.69	99,690,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000,000.00	100.00	99.66	99,656,200.00
1.02.1.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,000,000.00	100.00	93.58	131,010,000.00
5.2.3	Belanja Modal	140,000,000.00	100.00	93.58	131,010,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140,000,000.00	100.00	93.58	131,010,000.00
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer desktop	50,000,000.00	100.00	99.00	49,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer laptop/notebook	50,000,000.00	100.00	99.00	49,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	40,000,000.00	100.00	80.03	32,010,000.00
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	225,000,000.00	100.00	99.87	224,715,041.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225,000,000.00	100.00	99.87	224,715,041.00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	225,000,000.00	100.00	99.87	224,715,041.00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	225,000,000.00	100.00	99.87	224,715,041.00
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,138,326,300.00	100.00	99.09	2,118,875,700.00
1.02.1.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	342,600,000.00	100.00	100.00	342,600,000.00
5.2.3	Belanja Modal	342,600,000.00	100.00	100.00	342,600,000.00
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	342,600,000.00	100.00	100.00	342,600,000.00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	%	Rp.
5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	342,600,000.00	100.00	100.00	342,600,000.00
1.02.1.02.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	660,346,000.00	100.00	98.11	647,870,500.00
5.2.3	Belanja Modal	660,346,000.00	100.00	98.11	647,870,500.00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	278,876,000.00	100.00	96.36	268,735,500.00
5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	260,000,000.00	100.00	96.10	249,859,500.00
5.2.3.11.22	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	18,876,000.00	100.00	100.00	18,876,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100,000,000.00	100.00	99.39	99,385,000.00
5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	100,000,000.00	100.00	99.39	99,385,000.00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	65,470,000.00	100.00	99.24	64,970,000.00
5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan televisi	30,470,000.00	100.00	100.00	30,470,000.00
5.2.3.15.05	Belanja modal Pengadaan sound system	35,000,000.00	100.00	98.57	34,500,000.00
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	200,000,000.00	100.00	99.79	199,580,000.00
5.2.3.23.02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	200,000,000.00	100.00	99.79	199,580,000.00
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	16,000,000.00	100.00	95.00	15,200,000.00
5.2.3.28.11	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	16,000,000.00	100.00	95.00	15,200,000.00
1.02.1.02.02.02.10	Pengadaan Meubelair	292,690,300.00	100.00	99.49	291,190,300.00
5.2.3	Belanja Modal	292,690,300.00	100.00	99.49	291,190,300.00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	100.00	96.67	43,500,000.00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	45,000,000.00	100.00	96.67	43,500,000.00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan meubelair	247,690,300.00	100.00	100.00	247,690,300.00
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	97,900,000.00	100.00	100.00	97,900,000.00
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan rak	149,790,300.00	100.00	100.00	149,790,300.00
1.02.1.02.02.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	842,690,000.00	100.00	99.35	837,214,900.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	842,690,000.00	100.00	99.35	837,214,900.00
5.2.2.28	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	85,000,000.00	100.00	98.48	83,710,000.00
5.2.2.28.13	Belanja pemeliharaan incenerator	85,000,000.00	100.00	98.48	83,710,000.00
5.2.2.29	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	199,890,000.00	100.00	99.00	197,895,000.00
5.2.2.29.07	Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)	142,500,000.00	100.00	99.00	141,075,000.00
5.2.2.29.10	Belanja pemeliharaan generator set	57,390,000.00	100.00	99.01	56,820,000.00
5.2.2.31	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	7,800,000.00	100.00	100.00	7,800,000.00
5.2.2.31.04	Belanja pemeliharaan kulkas	7,800,000.00	100.00	100.00	7,800,000.00
5.2.2.34	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	550,000,000.00	100.00	99.60	547,809,900.00
5.2.2.34.01	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran umum	550,000,000.00	100.00	99.60	547,809,900.00
1.02.1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	186,017,000.00	100.00	99.17	184,463,950.00
1.02.1.02.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	186,017,000.00	100.00	99.17	184,463,950.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186,017,000.00	100.00	99.17	184,463,950.00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	%	Rp.
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	186,017,000.00	100.00	99.17	184,463,950.00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	186,017,000.00	100.00	99.17	184,463,950.00
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	628,000,000.00	97.69	86.53	543,408,124.00
1.02.1.02.02.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	628,000,000.00	97.69	86.53	543,408,124.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	628,000,000.00	97.69	33.23	208,715,624.00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	213,500,000.00	100.00	97.76	208,715,624.00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	213,500,000.00	100.00	97.76	208,715,624.00
5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	414,500,000.00	96.50	80.75	334,692,500.00
5.2.2.19.03	Belanja bimbingan teknis	414,500,000.00	96.50	80.75	334,692,500.00
1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,891,300.00	100.00	100.00	59,891,200.00
1.02.1.02.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,000,000.00	100.00	100.00	26,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,000,000.00	100.00	100.00	26,000,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,000,000.00	100.00	100.00	26,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,000,000.00	100.00	100.00	26,000,000.00
1.02.1.02.02.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	33,891,300.00	100.00	100.00	33,891,200.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,891,300.00	100.00	100.00	33,891,200.00
5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	33,891,300.00	100.00	100.00	33,891,200.00
5.2.2.19.03	Belanja bimbingan teknis	33,891,300.00	100.00	100.00	33,891,200.00
1.02.1.02.02.20	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150,000,000.00	100.00	98.78	148,170,000.00
1.02.1.02.02.20.02	Penyusunan Standar Kesehatan	150,000,000.00	100.00	98.78	148,170,000.00
5.2.3	Belanja Modal	150,000,000.00	100.00	98.78	148,170,000.00
5.2.3.32	Belanja Modal Pembangunan/Pengadaan Sistem Informasi	150,000,000.00	100.00	98.78	148,170,000.00
5.2.3.32.05	Belanja modal Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	150,000,000.00	100.00	98.78	148,170,000.00
1.02.1.02.02.21	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50,217,875,800.00	100.00	98.54	49,484,787,957.84
1.02.1.02.02.21.01	Pembangunan Rumah Sakit	37,635,643,000.00	100.00	98.16	36,943,778,175.00
5.2.3	Belanja Modal	37,635,643,000.00	100.00	98.16	36,943,778,175.00
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	37,635,643,000.00	100.00	98.16	36,943,778,175.00
5.2.3.24.18	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung rumah sakit	37,635,643,000.00	100.00	98.16	36,943,778,175.00
1.02.1.02.02.21.02	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	9,333,377,800.00	100.00	99.67	9,302,641,082.84
5.2.3	Belanja Modal	9,333,377,800.00	100.00	99.67	9,302,641,082.84
5.2.3.17	Belanja modal Pengadaan alat-alat Kedokteran	9,333,377,800.00	100.00	99.67	9,302,641,082.84
5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	7,673,877,800.00	100.00	99.72	7,652,735,082.84
5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah	1,659,500,000.00	100.00	99.42	1,649,906,000.00
1.02.1.02.02.21.03	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)	3,248,855,000.00	100.00	99.68	3,238,368,700.00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	%	Rp.
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62,550,000.00	100.00	97.92	61,250,000.00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	23,550,000.00	100.00	98.51	23,200,000.00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	23,550,000.00	100.00	98.51	23,200,000.00
5.2.2.47	Belanja Barang Operasional	39,000,000.00	100.00	97.56	38,050,000.00
5.2.2.47.27	Belanja Peralatan Kebersihan	39,000,000.00	100.00	97.56	38,050,000.00
5.2.3	Belanja Modal	3,186,305,000.00	100.00	99.71	3,177,118,700.00
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	41,075,000.00	100.00	98.17	40,325,000.00
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel lainnya.	41,075,000.00	100.00	98.17	40,325,000.00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,004,180,000.00	100.00	99.87	3,000,398,700.00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	60,000,000.00	100.00	97.63	58,575,000.00
5.2.3.11.10	Belanja modal Pengadaan generator set	2,844,180,000.00	100.00	99.95	2,842,678,500.00
5.2.3.11.24	Belanja modal Pengadaan gorden dan perlengkapannya	100,000,000.00	100.00	99.15	99,145,200.00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan meubelair	14,000,000.00	100.00	92.86	13,000,000.00
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	14,000,000.00	100.00	92.86	13,000,000.00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	71,800,000.00	100.00	96.86	69,545,000.00
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	16,800,000.00	100.00	98.21	16,500,000.00
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	32,000,000.00	100.00	96.88	31,000,000.00
5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan dispenser	15,000,000.00	100.00	94.97	14,245,000.00
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan kulkas	8,000,000.00	100.00	97.50	7,800,000.00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00	100.00	95.00	5,700,000.00
5.2.3.15.12	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	6,000,000.00	100.00	95.00	5,700,000.00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	49,250,000.00	100.00	97.77	48,150,000.00
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan timbangan	49,250,000.00	100.00	97.77	48,150,000.00
1.02.1.02.02.22	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1,155,701,400.00	88.92	87.24	1,008,231,197.00
1.02.1.02.02.22.01	Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	154,500,000.00	100.00	99.27	153,370,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154,500,000.00	100.00	99.27	153,370,000.00
5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	154,500,000.00	100.00	99.27	153,370,000.00
5.2.2.19.01	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	154,500,000.00	100.00	99.27	153,370,000.00
1.02.1.02.02.22.02	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	400,000,000.00	90.00	88.07	352,287,269.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400,000,000.00	90.00	88.07	352,287,269.00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,000,000.00	100.00	98.30	31,454,458.00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	32,000,000.00	100.00	98.30	31,454,458.00
5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	368,000,000.00	89.13	87.18	320,832,811.00
5.2.2.19.01	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	340,000,000.00	88.24	86.69	294,732,811.00
5.2.2.19.03	Belanja bimbingan teknis	28,000,000.00	100.00	93.21	26,100,000.00
1.02.1.02.02.22.03	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	601,201,400.00	85.36	83.59	502,573,928.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	601,201,400.00	85.36	83.59	502,573,928.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,000,000.00	63.33	59.79	143,499,278.00
5.2.2.01.18	Belanja obat-obatan	240,000,000.00	63.33	59.79	143,499,278.00
5.2.2.05	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	361,201,400.00	100.00	99.41	359,074,650.00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	%	Rp.
5.2.2.05.03	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada FKTP (Dana Non Kapitasi JKN)	361,201,400.00	100.00	99.41	359,074,650.00
1.02.1.02.02.24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	106,734,340,200.00	77.48	73.01	77,927,694,218.28
1.02.1.02.02.24.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di RSUD	106,734,340,200.00	77.48	73.01	77,927,694,218.28
5.2.1	Belanja Pegawai	61,295,277,414.00	74.23	69.48	42,587,285,029.50
5.2.1.04	Belanja Pegawai Lainnya	61,295,277,414.00	74.23	69.48	42,587,285,029.50
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai Dana BLUD	61,295,277,414.00	74.23	69.48	42,587,285,029.50
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,243,400,852.00	84.13	79.93	32,966,581,208.78
5.2.2.48	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	41,243,400,852.00	84.13	79.93	32,966,581,208.78
5.2.2.48.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	41,243,400,852.00	84.13	79.93	32,966,581,208.78
5.2.3	Belanja Modal	4,195,661,934.00	59.59	56.58	2,373,827,980.00
5.2.3.33	Belanja Modal Lainnya	4,195,661,934.00	59.59	56.58	2,373,827,980.00
5.2.3.33.01	Belanja Modal Dana BLUD	4,195,661,934.00	59.59	56.58	2,373,827,980.00
		161,934,772,000.00	85.07	81.59	132,125,687,588.12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang) (Rp)	%
		Anggaran (RBA)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.1	BIAYA OPERASIONAL	106.528.220.200,00	77.764.207.043,29	28.764.013.156,71	73,00
5.1.01	BIAYA PELAYANAN	92.788.072.994,00	66.801.527.033,79	25.986.545.960,21	71,99
5.1.01.01	Biaya Pegawai	11.954.985.000,00	10.528.799.954,00	1.426.185.046,00	88,07
5.1.01.01.11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.375.135.000,00	1.556.340.000,00	818.795.000,00	65,53
5.1.01.01.14	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	68.850.000,00	2.000.000,00	66.850.000,00	2,90
5.1.01.01.15	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	211.000.000,00	186.000.000,00	25.000.000,00	88,15
5.1.01.01.18	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	9.300.000.000,00	8.784.459.954,00	515.540.046,00	94,46
5.1.01.02	Biaya Bahan	29.235.292.030,00	21.773.355.567,79	7.461.936.462,21	74,48
5.1.01.02.01	Biaya Bahan Obat-obatan	12.310.515.910,00	9.048.769.897,09	3.261.746.012,91	73,50
5.1.01.02.02	Biaya BHP Medis	7.671.252.446,00	5.437.986.270,00	2.233.266.176,00	70,89
5.1.01.02.03	Biaya Bahan dan alat Laboratorium Klinik	1.614.369.800,00	1.344.133.052,00	270.236.748,00	83,26
5.1.01.02.05	Biaya Bahan dan alat Radiologi	712.200.348,00	620.904.800,00	91.295.548,00	87,18
5.1.01.02.06	Biaya Bahan Makanan Pokok	1.470.472.300,00	1.215.025.942,70	255.446.357,30	82,63
5.1.01.02.07	Biaya Bahan Peralatan dan Perlengkapan Laundry	760.181.982,00	739.244.982,00	20.937.000,00	97,25
5.1.01.02.08	Biaya Bahan Gas Medis	1.929.000.000,00	1.557.365.529,00	371.634.471,00	80,73
5.1.01.02.09	Biaya Bahan Pengolahan Darah/Bank Darah	1.320.025.000,00	779.380.000,00	540.645.000,00	59,04
5.1.01.02.12	Biaya BHP Non Medis	1.447.274.244,00	1.030.545.095,00	416.729.149,00	71,21
5.1.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	48.640.142.414,00	31.777.442.018,00	16.862.700.396,00	65,33
5.1.01.03.01	Biaya Jasa Pelayanan Medis	48.640.142.414,00	31.777.442.018,00	16.862.700.396,00	65,33
5.1.01.03.03	Lain-lain Biaya Jasa Pelayanan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Biaya Pemeliharaan	860.498.850,00	857.598.594,00	2.900.256,00	99,66
5.1.01.04.02	Biaya Pemeliharaan - alat Kedokteran	376.998.850,00	376.798.594,00	200.256,00	99,95
5.1.01.04.05	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Laundry	62.500.000,00	62.150.000,00	350.000,00	99,44
5.1.01.04.06	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Kesehatan/Perawatan	276.000.000,00	275.900.000,00	100.000,00	99,96
5.1.01.04.08	Biaya Pemeliharaan - Peralatan/ Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Biaya Pemeliharaan - Jaringan Ruma Sakit	25.000.000,00	23.500.000,00	1.500.000,00	94,00
5.1.01.04.10	Biaya Pemeliharaan - Komputer dan Leptop	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.11	Biaya Pemeliharaan - Printer	30.000.000,00	29.250.000,00	750.000,00	97,50
5.1.01.05	Biaya Barang dan Jasa	2.097.154.700,00	1.864.330.900,00	232.823.800,00	88,90
5.1.01.05.01	Biaya Cetakan Rekam Medis	1.626.499.500,00	1.624.171.900,00	2.327.600,00	99,86
5.1.01.05.03	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	72.900.000,00	0,00	72.900.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang) (Rp)	%
		Anggaran (RBA)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.04	Biaya BBM/Gas LPG	192.385.200,00	154.018.000,00	38.367.200,00	80,06
5.1.01.05.05	Biaya Peralatan Makan dan Dapur	205.370.000,00	86.141.000,00	119.229.000,00	41,94
5.1.01.07	Biaya Pelayanan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07.01	Biaya Pemeriksaan Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	9.544.485.272,00	8.588.852.029,50	955.633.242,50	89,99
5.1.02.01	Biaya Pegawai	700.150.000,00	281.043.057,50	419.106.942,50	40,14
5.1.02.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	336.500.000,00	281.043.057,50	55.456.942,50	83,52
5.1.02.01.16	Honorarium Pengelola Kegiatan	363.650.000,00	0,00	363.650.000,00	0,00
5.1.02.02	Biaya Administrasi Kantor	2.082.822.022,00	1.927.413.841,00	155.408.181,00	92,54
5.1.02.02.01	Biaya Alat Tulis Kantor	407.198.347,00	401.158.740,00	6.039.607,00	98,52
5.1.02.02.02	Biaya Cetak	382.842.675,00	378.419.700,00	4.422.975,00	98,84
5.1.02.02.03	Biaya Penggandaan	143.430.000,00	132.079.800,00	11.350.200,00	92,09
5.1.02.02.05	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	40,00
5.1.02.02.08	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	249.837.500,00	225.802.500,00	24.035.000,00	90,38
5.1.02.02.12	Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH)	132.158.000,00	130.920.900,00	1.237.100,00	99,06
5.1.02.02.15	Biaya Pakaian Kerja Lapangan	11.570.000,00	4.500.000,00	7.070.000,00	38,89
5.1.02.02.20	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	75,00
5.1.02.02.21	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.000.000,00	181.780.746,00	26.219.254,00	87,39
5.1.02.02.26	Biaya Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	522.285.500,00	456.701.455,00	65.584.045,00	87,44
5.1.02.02.31	Biaya Dokumen Sertifikat dan Ijin	5.000.000,00	2.250.000,00	2.750.000,00	45,00
5.1.02.03	Biaya Pemeliharaan	1.207.382.000,00	1.204.828.775,00	2.553.225,00	99,79
5.1.02.03.01	Biaya Pemeliharaan - Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	32.844.320,00	2.155.680,00	93,84
5.1.02.03.08	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Dapur	3.236.000,00	3.200.000,00	36.000,00	98,89
5.1.02.03.16	Biaya Pemeliharaan - Gedung dan Bangunan	1.058.346.000,00	1.058.316.955,00	29.045,00	100,00
5.1.02.03.18	Biaya Pemeliharaan - Jaringan Air	62.000.000,00	61.667.500,00	332.500,00	99,46
5.1.02.03.21	Biaya Pemeliharaan - Instalasi Pengolahan Limbah	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.04	Biaya Barang dan Jasa	5.187.131.250,00	4.894.521.356,00	292.609.894,00	94,36
5.1.02.04.01	Biaya alat Listrik dan Instalasi	118.241.250,00	118.241.250,00	0,00	100,00
5.1.02.04.02	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.090.000,00	7.710.000,00	380.000,00	95,30
5.1.02.04.03	Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas	244.266.000,00	244.265.544,00	456,00	100,00
5.1.02.04.04	Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	14.958.750,00	41.250,00	99,73
5.1.02.04.05	Biaya Telepon	54.000.000,00	33.209.257,00	20.790.743,00	61,50
5.1.02.04.06	Biaya Air	168.000.000,00	151.003.000,00	16.997.000,00	89,88

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang) (Rp)	%
		Anggaran (RBA)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.07	Biaya Listrik	1.650.000.000,00	1.602.314.860,00	47.685.140,00	97,11
5.1.02.04.09	Biaya Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	3.120.000,00	1.080.000,00	74,29
5.1.02.04.10	Biaya Kawat / Faksimile / Internet	102.000.000,00	42.437.600,00	59.562.400,00	41,61
5.1.02.04.11	Biaya Paket / Pengiriman	6.000.000,00	3.579.550,00	2.420.450,00	59,66
5.1.02.04.12	Biaya Sertifikasi	150.000.000,00	89.066.045,00	60.933.955,00	59,38
5.1.02.04.20	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.04.38	Biaya Jasa Konsultansi Penelitian	116.600.000,00	114.100.000,00	2.500.000,00	97,86
5.1.02.04.49	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5.1.02.04.58	Biaya Pemeriksaan Lab. Kesling	27.500.000,00	26.349.000,00	1.151.000,00	95,81
5.1.02.04.60	Biaya Jasa Pemusnahan Sampah Medis dan Abu	275.734.000,00	273.883.500,00	1.850.500,00	99,33
5.1.02.04.61	Biaya Jasa Kebersihan Kantor (CS)	2.231.250.000,00	2.170.283.000,00	60.967.000,00	97,27
5.1.02.04.65	Biaya Pemeriksaan Kesehatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.05	Biaya Promosi	361.000.000,00	275.045.000,00	85.955.000,00	76,19
5.1.02.05.01	Biaya Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi	286.000.000,00	245.045.000,00	40.955.000,00	85,68
5.1.02.05.02	Biaya Jasa Pembuatan Media Informasi / Publikasi	75.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	40,00
5.1.02.08	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.08.01	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.1.03	BIAYA INVESTASI	4.195.661.934,00	2.373.827.980,00	1.821.833.954,00	56,58
5.1.03.03	Biaya Modal	4.195.661.934,00	2.373.827.980,00	1.821.833.954,00	56,58
5.1.03.03.01	Biaya Alat Kesehatan dan Kedokteran	2.428.281.979,00	1.179.398.980,00	1.248.882.999,00	48,57
5.1.03.03.02	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	885.289.955,00	784.300.000,00	100.989.955,00	88,59
5.1.03.03.05	Biaya Meubelair	233.000.000,00	227.950.000,00	5.050.000,00	97,83
5.1.03.03.10	Biaya Pengadaan Mesin dan Peralatan Penunjang Kesehatan	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00
5.1.03.03.11	Biaya Modal Peralatan Dapur dan Laundry	190.090.000,00	182.179.000,00	7.911.000,00	95,84
5.1.03.03.12	Biaya Modal Software / Sistem Informasi Manajemen	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
5.2	BIAYA NON OPERASIONAL	206.120.000,00	163.487.174,99	42.632.825,01	79,32
5.2.01	BIAYA NON OPERASIONAL	206.120.000,00	163.487.174,99	42.632.825,01	79,32
5.2.01.01	Biaya Bunga	200.000.000,00	163.187.174,99	36.812.825,01	81,59
5.2.01.01.01	Biaya Bunga	200.000.000,00	163.187.174,99	36.812.825,01	81,59
5.2.01.02	Biaya Administrasi Bank	6.120.000,00	300.000,00	5.820.000,00	4,90
5.2.01.02.01	Biaya Administrasi Bank	6.120.000,00	300.000,00	5.820.000,00	4,90
	JUMLAH BIAYA	106.734.340.200,00	77.927.694.218,28	28.806.645.981,72	73,01

6. Apresiasi yang Pernah Diterima

No.	Nama Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun Penerima Penghargaan
1.	Terbaik I Rumah Sakit Pelayanan Prima Kategori Rumah Sakit Rujukan Regional Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	2018-2019
2.	Reakreditasi Ulang 2	KARS	2019
3.	Juara 1 Lomba Kebersihan Tingkat SOPD se Kab. Kotawaringin Barat	Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat	2018 s.d 2019
4.	Peringkat 1 Pelayanan JKN Terunggul regional BPJS Cabang Sampit → Nominasi Nasional 42 Besar RS Terunggul Pelayanan JKN wakil Kalimantan	BPJS	2019

7. SOP penyusunan LKjIP

	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Nomor SOP : U/SOP/09/325
	Subag Perencanaan dan Pengendalian Program	Tanggal Pembuatan : 15 Juni 2019
		Tanggal Revisi :
		Tanggal Pengesahan : 17 Juni 2019
		Disahkan :  Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun  dr. FACHRUDDIN NIP. 19711121 200212 1 005
SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.		1. Menguasai administrasi keuangan 2. Menguasai administrasi perkantoran 3. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
Renstra Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Laporan Keuangan		1. Komputer 2. Jaringan internet 3. ATK
Himbauan		Pencatatan dan Pendataan
LKjIP disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir		File ini disimpan oleh Subbag Perencanaan dan Pengendalian Program

Diagram Alur SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

